

RENCANA STRATEGIS  
**RENSTRA**  
**2021-2026**





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dokumen Renstra ini disusun dari hasil pengumpulan dan kompilasi data serta study literatur, dalam upaya memenuhi kewajiban instansi pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 dan diharapkan dapat memberikan kontribusi, bagi semua pihak guna terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, 8 September 2021

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lombok Tengah



**LAJUGAHADIAN, M.Si**  
NIP. 19671231 199203 1 117



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum .....	10
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>40</b>
3.1 Tugas, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	51
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	54
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>63</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	63
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>67</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>70</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>79</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>80</b>



## EXECUTIVE SUMMARY

Dokumen Rencana strategik di susun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2008 yang antara lain didalamnya memuat berbagai program yang disusun secara realistis sesuai kebutuhan dan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021 – 2026. Masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Otonomi Daerah.

Dengan pembahasan ini diharapkan dapat ditemukan essensi masalah atau masalah strategik untuk diprioritaskan pemecahannya sehingga pelayanan prasarana dasar dapat ditingkatkan kualitasnya. Data dan informasi dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode observasi yaitu menggali pengalaman langsung para karyawan dan berbagai dokumen tertulis.

Metode analisis data menggunakan metode analisis manajemen strategik yaitu mencermati aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi lingkungan strategik, kemudian ditemukan asumsi-asumsi serta faktor-faktor penentu keberhasilan, sehingga dapat disusun rencana strategik yang logis dan sistemik. Analisis atau kajian atas data/fakta berlandaskan pada pendekatan kajian perubahan paradigma, membangun organisasi pembelajaran, kebijakan publik, pemberdayaan rakyat, perwujudan good governance dan otonomi daerah, serta teori – teori lain yang relevan.

Dari analisis data ditemukan beberapa essensi masalah atau masalah strategik, selanjutnya disusun upaya pemecahan yaitu dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan operasional, program dan kegiatan, apabila telah mendapatkan persetujuan Eksekutif dan Legislatif, Umum harus dijadikan acuan dan pedoman semua aparatur Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam melaksanakan program kerjanya. Atas analisis dan temuan essensi masalah atau masalah strategik dan perubahan RPJMD Kabupaten



Lombok Tengah tahun 2021-2026 dapat disimpulkan bahwa diperlukan kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah agar dapat memenuhi harapan yang diinginkan. Akhirnya dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang berkompeten agar mendapat dukungan untuk dicantumkan dalam APBD.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah pusat dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan ber sasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan maupun tahunan.

Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumber daya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasilguna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud Pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan

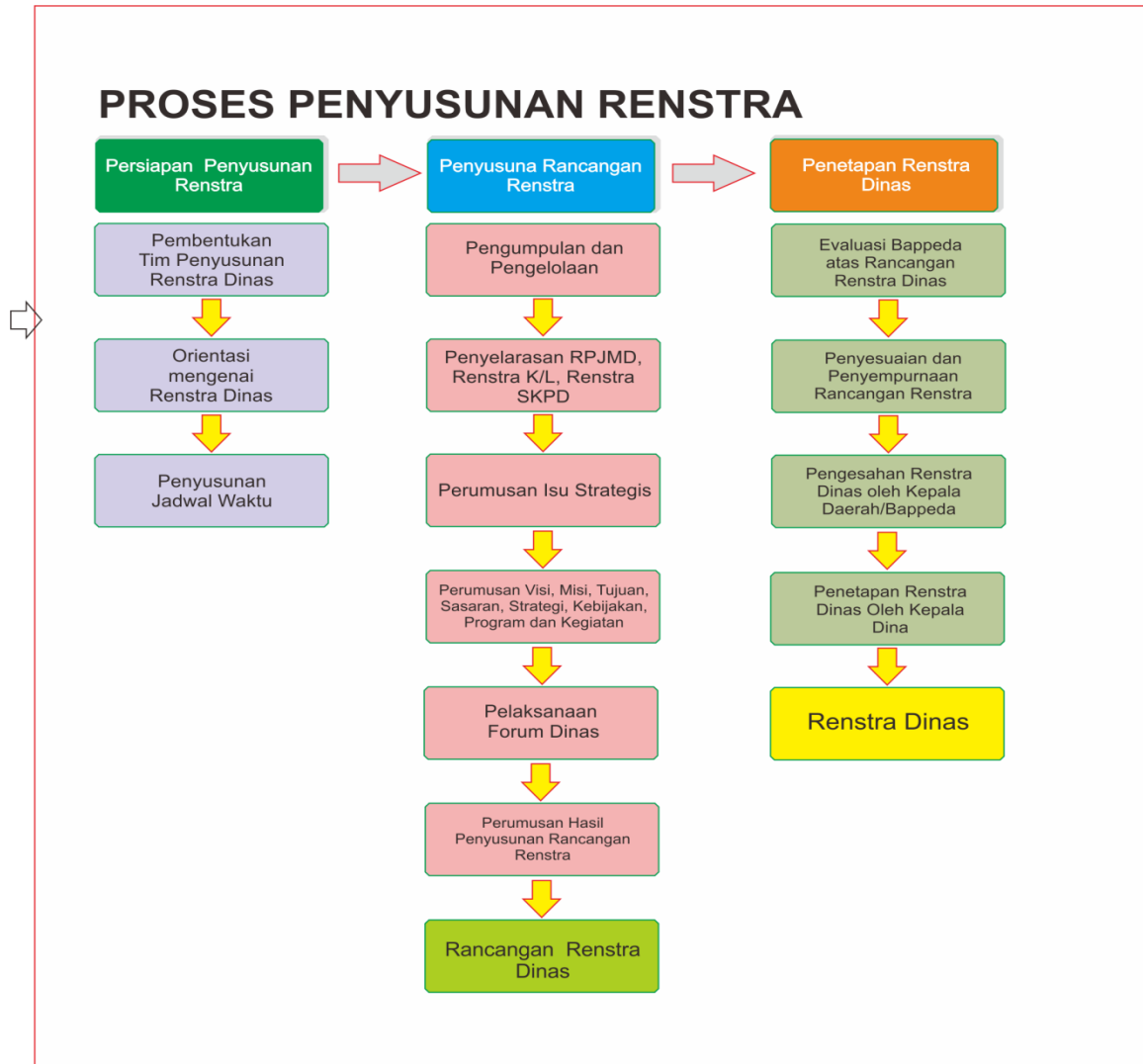




satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

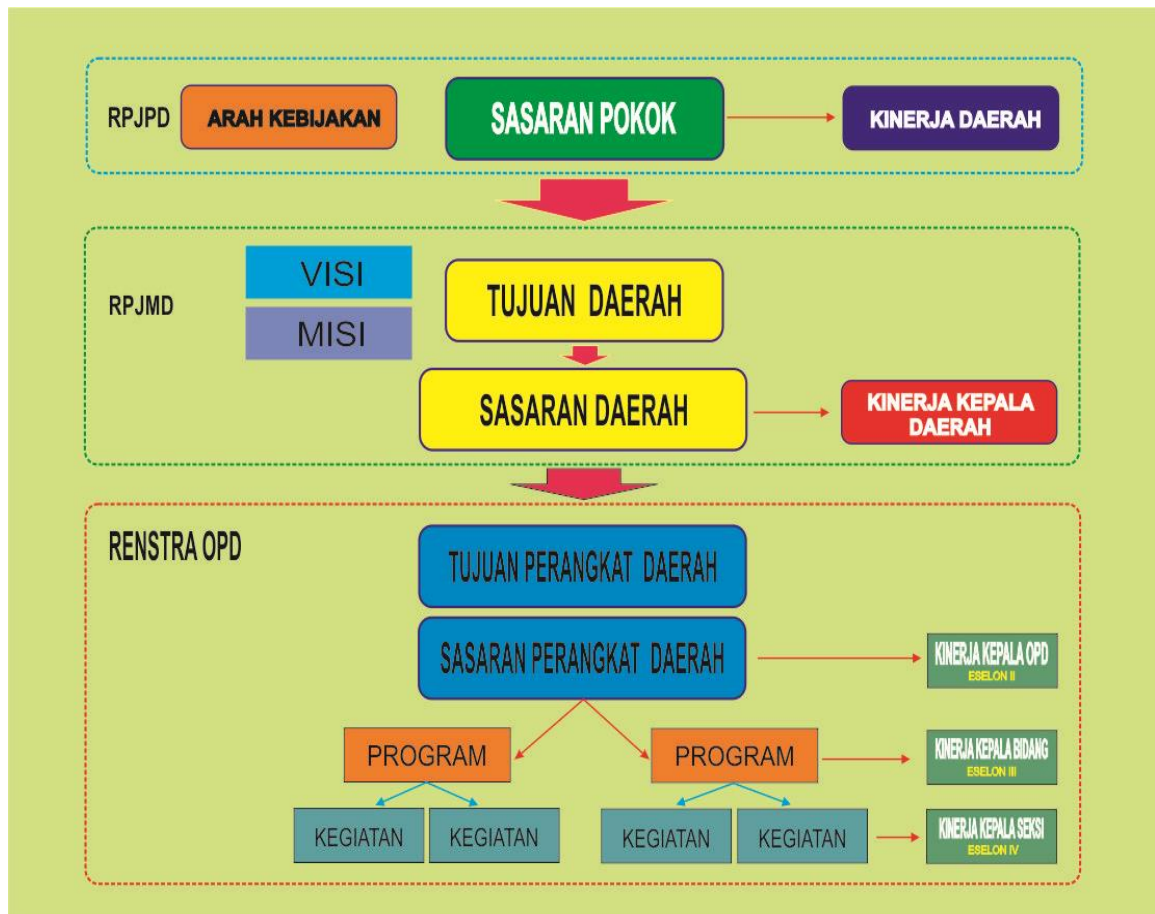
Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 – 2026.

Renstra Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis RPJMD, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penetapan Renstra Dinas, yang disajikan pada Gambar



Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2021–2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar

## GAMBAR KETERKAIATAN RPJMD DAN RENSTRA OPD



Dilihat dari gambar diatas Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan 5 (lima) tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

### 1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Rencana Strategik Kabupaten Lombok Tengah;
2. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);



3. Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, sehingga harus dijadikan acuan oleh setiap unsur Perangkat Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan Prioritas – prioritas pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah memberikan arah yang lebih jelas terhadap tujuan pembangunan yang ingin dicapai dengan mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat melalui kerja sama dari semua pihak serta memudahkan penyusunan perencanaan tahunan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari materi pembahasan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 disusun menurut Sistematika (Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) dengan penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tugas, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

##### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### BAB VII INERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### BAB VIII PENUTUP





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbentuk pada awal dimulainya Otonomi Daerah dengan Perda no. 11 tahun 2000, dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 7 Tahun 1999 dan di review kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### 2.1.1 Tugas Pokok:

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.

Adapun Fungsi Dinas sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana dan program serta melaksanakan kebijaksanaan dalam Membantu Bupati dibidang pekerjaan umum;
- b. Pengelolaan Tata Usaha Dinas yang meliputi administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;
- c. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pelaksanaan Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan hubungan kedalam maupun keluar;
- f. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT );
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;



Secara rinci dapat dijelaskan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan Program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran rutin, pelaporan, serta pembinaan organisasi dan perlengkapan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan Peraturan Daerah, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyusunan rencana program pembangunan dibidang pekerjaan umum;
- d. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dibidang pekerjaan umum;
- e. Penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat Dinas terdiri dari:

- a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bidang Keuangan;
- c. Sub Bidang Perencanaan;

#### 2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan teknis;
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga;





- c. Pengawasan dan pengendalian teknis dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang kebinamargaan;
- d. Pendataan dan penyusunan serta penyampaian laporan dibidang kebinamargaan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;
- f. Pengaturan status jalan dan jembatan Kabupaten dan Desa;
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten dan Desa;
- h. Pendataan dan penginventarisiran aset-aset jalan dan jembatan;
- i. Pemantauan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C. disekitar lokasi jalan dan jembatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

### 3. Bidang Sumberdaya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang SDA.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Sumberdaya Air mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Perencanaan Teknis;
- b. Pembinaan / penyuluhan dan bimbingan teknis dalam bidang Sumber Daya Air (SDA);
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana dibidang SDA;
- d. Pengaturan, pengelolaan, hasil pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;



- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;
  - f. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
  - g. Pegelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;
  - h. Pemantauan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C disekitar lokasi pada Daerah Aliran Sungai ( DAS );
  - i. Pelaksanaan Pengembangan, pengelolaan Rawa dan Pantai;
  - j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;
  - k. Pendataan aset dibidangSDA;
  - l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bidang SDA;
  - m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan dibidang SDA;
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- Bidang Sumberdaya Air terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis SDA
  - b. Seksi OP dan pemanfaatan SDA;
  - c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana SDA;
4. Bidang Cipta Karya
- Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang cipta karya.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi.
- a. Penyelenggaraan perencanaan teknis.
  - b. Penyelenggaraan pembinaan/bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
  - c. Penyediaan dan pengelolaan air bersih,



- d. Pelaksanaan pendataan, pengolahan data base bidang keciptakaryaan;
  - e. Pelaksanaan rekomendasi pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
  - f. Pelaksanaan pelaporan dibidang keciptakaryaan;
  - g. Pelaksanaan pendataan aset-aset dibidang keciptakaryaan;
  - h. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- Bidang Cipta Karya terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis Keciptakaryaan;
  - b. Seksi Pembangunan Gedung
  - c. Seksi Air Minum dan PenyehatanLingkungan;

#### 5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.





Bidang Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang
  - c. Seksi Pengendalian Ruang
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Pengujian
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Peralatan dan Pengujian.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Pengujian mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan;
  - b. Penyusunan penyelenggaraan administrasi dan inventarisasi peralatan penggudangan, penyimpanan dan pendistribusian alat;
  - c. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian peralatan;
  - d. Pelayanan peralatan kepada masyarakat dan pihak ke tiga;
  - e. Pelaksanaan pelaporan pengoperasian peralatan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas perkerjaan Umum;
  - g. Pelaksanaan penyelidikan, pengujian beton, tanah, baja, kayu dan bahan bangunan lainnya;
  - h. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan standar pelayanan minimal dibidang pekerjaan umum;
  - i. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan kalibrasi alat pengujian;
  - j. Pelayanan rekomendasi hasil – hasil uji laboratorium;
  - k. Pelaksanaan pelaporan hasil pengujian;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas perkerjaan Umum;



7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jasa konstruksi

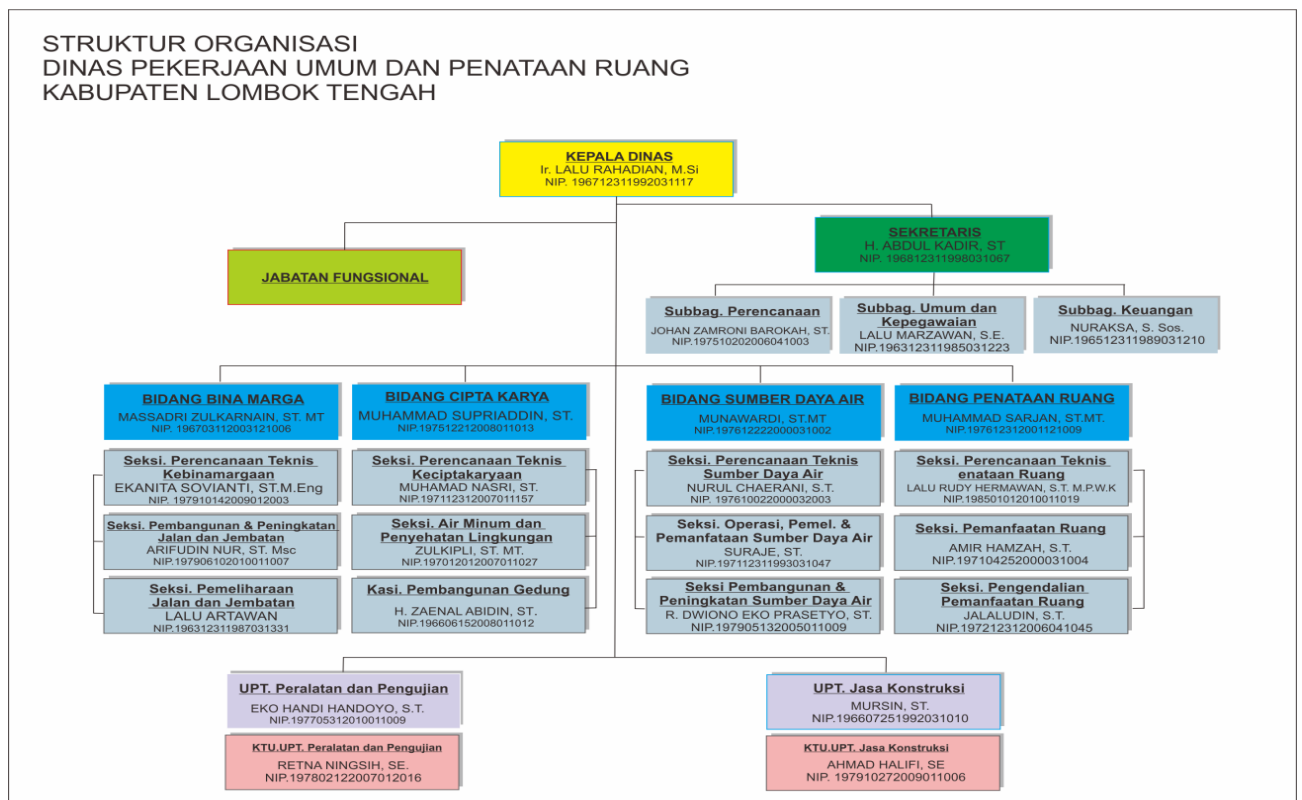
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jasa konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Peralatan dan Pengujian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jasa konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. Pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan sebagian tugas dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas perkerjaan Umum;

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk Jelasnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :





### 2.1.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis yang masih kurang dimana untuk sampai saat ini jumlah tenaga tehnis yang ada sebanyak 30% dan tenaga non teknis 70%. Perbandingan jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis ini berbanding terbalik dari kebutuhan yang yang seharusnya, sebagai salah satu dinas tekhnis, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70 % tenaga teknis dan 30 % tenaga non teknis.

Sampai dengan Bulan September 2021, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dan jajarannya sebanyak 178, dengan profil demografi sebagai berikut:





DAFTAR : NOMINATIF PNS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LOMBOK TENGAH

No.	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PEND.	JURUSAN	TH PEND.	TGL LAHIR	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Ir. LALU RAHADIAN, M.Si	196712311992031117	IV/c	01-10-2017	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	07-09-2021	II.b	S2	Ilmu Lingkungan	2003	31-12-1967	01-03-1992	01-12-1993
2	H. ABDUL KADIR, S.T.	196812311998031067	IV/b	01-04-2020	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	07-01-2020	III.a	S1	Teknik Sipil	1994	31-12-1968	01-03-1998	01-04-1999
3	SUPARDJONO, S.Pd., M.Sc	197605152000121003		01-04-2017	Analisis Pemanfaatan Ruang	13-09-2021		S2	Ilmu Lingkungan	2010	15-05-1976	01-03-2000	01-01-2001
4	MUHAMMAD SARJAN, ST.MT.	197612312001121009	IV/a	01-04-2018	Kabid. Penataan Ruang	01-02-2017	III.b	S2	Mag. Perenc. Kota & Daerah	2007	31-12-1976	01-12-2001	01-04-2003
5	LALU MARZAWAN, S.E.	196312311985031223	III/d	01-10-2005	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	01-02-2017	IV.a	S1	Ekonomi Pembangunan		31-12-1963	01-03-1985	01-10-1986
6	LALU ARTAWAN	196312311987031331	III/d	01-04-2011	Kasi. Pemeliharaan Jalan dan	01-02-2017	IV.a	STM	Bangunan	1982	31-12-1963	01-03-1987	01-07-1988
7	AMIR HAMZAH, S.T.	197104252000031004	III/d	01-10-2011	Kasi. Pemanfaatan Ruang	01-02-2017	IV.a	S1	Teknik Mesin	1995	25-04-1971	01-03-2000	01-04-2001
8	NURUL CHAERANI, S.T.	197610022000032003	III/d	01-04-2012	Kasi. Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	01-02-2017	IV.a	S1	Teknik Pengairan	1999	02-10-1976	01-03-2000	01-04-2001
9	SURAJE, ST.	197112311993031047	III/d	01-10-2016	Kasi. Operasi, Pemel. & Pemanfaatan Sumber Daya Air	07-01-2020	IV.a	S1	Teknik Sipil	2003	31-12-1971	01-03-1993	01-08-1994
10	NURAKSA, S. Sos.	196512311989031210	III/d	01-04-2017	Kasubag. Keuangan	07-01-2020		S1	Ilmu Adm. Negara	2006	31-12-1965	01-02-1989	01-04-1990
11	LALU AHADI, S.Sos.	197004041990031005	III/d	01-04-2017	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan			S1	Ilmu Adm. Negara	2012	04-04-1970	01-03-1990	01-03-1992
12	JALALUDIN, S.T.	197212312006041045	III/d	01-04-2018	Kasi. Pengendalian	01-02-2017	IV.a	S1	Teknik Arsitektur	2000	31-12-1972	01-04-2006	01-05-2007
13	MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST.	197512212008011013	III/d	01-04-2018	Kabid. Cipta Karya			S1	Teknik Sipil	2001	21-12-1975	01-01-2008	01-04-2009
14	JOHAN ZAMRONI BAROKAH, ST.	197510202006041003	III/d	01-04-2018	Kasubbag. Perencanaan	01-02-2017	IV.a	S1	Teknik Arsitektur	1999	20-10-1975	01-04-2006	01-05-2007
15	MUHAMAD NASRI, ST.	197112312007011157	III/d	01-04-2019	Kasi. Perencanaan Teknis Keciptakarya	01-02-2017	IV.a	S1	Teknik Arsitek	1999	31-12-1971	01-01-2007	01-06-2008
16	ZULKUPLI, ST. MT.	197012012007011027	III/d	01-04-2019	Kasi. Air Minum dan Kesehatan Lingkungan	07-01-2020	IV.a	S2	Teknik Pengairan	2012	01-12-1970	01-01-2007	01-06-2008
17	MURSI, ST.	196607251992031010	III/d	01-04-2020	Kepala UPT. Jasa Konstruksi	07-01-2020		S1	Teknik Sipil	2007	25-07-1966	01-03-1992	01-04-1993
18	H. ZAENALABIDIN, ST.	196606152008011012	III/d	01-04-2020	Kasi. Pembangunan Gedung	01-02-2017	IV.a	S1	Teknik Sipil	1994	15-06-1966	01-01-2008	01-04-2009
19	LALU MIRZA AMRULLOH, ST.	197205042008011029	III/d	01-04-2020	Pengelola Pemeliharaan Jalan			S1	Teknik Sipil	1999	04-05-1972	01-01-2008	01-04-2009
20	H. JUMANEM, S. Sos.	197212311994021013	III/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum			S1	Ilmu Adm. Negara	2006	31-12-1972	01-02-1994	01-11-1995
21	MUNAWARDI, ST.MT	197612222000031002	III/d	01-04-2020	Kabid Sumber Daya Air	07-01-2020	IV.a	S1	Teknik Sipil	2006	22-12-1976	01-03-2000	01-04-2001
22	LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA,	197907142009011009	III/d	01-04-2021	Pengawas Bangunan dan	15-07-2020		S1	Teknik Sipil	1979	14-07-1979	01-01-2009	01-07-2010
23	EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng	197910142009012003	III/d	01-04-2021	Kasi. Perencanaan Teknis Kebenamargaan	01-02-2017	IV.a	S2	Teknik Sipil	2003	14-10-1979	01-01-2009	01-03-2010
24	AHMAD HALIFI, SE.	197910272009011006	III/d	01-04-2021	Kasubbag. TU. UPT. Jasa Konstruksi	01-02-2017	IV.b	S1	Ekonomi Pembangunan	2003	27-10-1979	01-01-2009	01-03-2010
25	SAIFUL ZUHRI, ST. MT	197604202009011004	III/d	01-04-2021	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman			S2	Magister Perenc. Kota & daerah	2014	20-04-1976	01-01-2009	01-03-2010
26	ARIFUDIN NUR, ST. MSc	197906102010011007	III/c	01-04-2018	Kasi. Pembangunan & Peningkatan Jalan dan	07-01-2020		S2	Magister Sistem & Teknik	2018	10-06-1979	01-01-2010	01-11-2011
27	MASSADRI ZULKARNAIN, ST. MT	196703112003121006	III/c	01-04-2018	Kabid Bina Marga	07-01-2020	IV.a	S2	Teknik Sipil	2019	11-03-1967	01-12-2003	01-02-2005
28	IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST. MT	198602122009011004	III/c	01-04-2018	Analisis Pengembangan			S1	Arsitektur	2017	12-02-1986	01-01-2009	01-03-2010
29	LALU RUDY HERMAWAN, S.T. M.P	198501012010011019	III/c	01-04-2018	Kasi. Perencanaan Teknis Penataan Ruang	07-01-2020		S1	Teknik Pemb. Wil & Kota	2018	01-01-1985	01-01-2010	01-11-2011
30	EKO HANDI HANDOYO, S.T.	197705312010011009	III/c	01-04-2018	Kepala UPT. Peralatan dan	07-01-2020		S1	Teknik Mesin	2002	31-05-1977	01-01-2010	01-11-2011



31	ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.AK	197901312010011015	III/c	01-04-2018	Bendahara		S2	Ekonomi Akuntansi	2017	31-01-1979	01-01-2010	01-11-2011
32	TODY AULIYA, S.T.	198406092010011016	III/c	01-04-2018	Analisis Pemanfaatan Ruang		S1	Teknik Perenc. Wil & Kota	2009	09-06-1984	01-01-2010	01-11-2011
33	RETNA NINGSIH, SE.	197802122007012016	III/c	01-10-2018	Kasubag TU. UPT Peralatan dan Pengujian	07-01-2020	S1	Ekonomi Akuntansi	2001	12-02-1978	01-01-2007	
34	R. DWIONO EKO PRASETYO, ST.	197905132005011009	III/c	01-04-2019	Kasi Pembangunan & Peningkatan Sumber Daya Air	07-01-2020	S1	Teknik Sipil	2004	13-05-1979	01-01-2005	01-03-2006
35	ABDURRAHIM	196507281986011002	III/b	01-04-2006	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	02-04-2020	STM	Listrik Umum	1984	28-07-1965	01-01-1986	01-04-1987
36	SYAHDAN	196512311986031202	III/b	01-04-2009	Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan		SMA			31-12-1965	01-03-1986	
37	LALU HAMLUL	196512311992031197	III/b	01-04-2012	Teknisi Peralatan dan Mesin UPTD Peralatan dan Pengujian		STM	Mesin Produksi	1985	31-12-1965	01-03-1992	01-04-1993
38	MUSTIAI	197006041992031011	III/b	01-04-2012	Pengelola Pemeliharaan Jalan		STM	Otomotif	1989	04-06-1970	01-03-1992	01-04-1993
39	BAIQ FITRIAH	197310011995032002	III/b	01-04-2015	Pengelola Keuangan		SMA	Ilmu-Ilmu Fisik	1992	01-10-1973	01-03-1995	01-05-1996
40	I KOMANG TIMBANG	196612311993031145	III/b	01-04-2016	Penjaga Pintu Air		SMA A3	IPS	1986	31-12-1966	01-03-1993	01-08-1994
41	N U R M A	196512311997031046	III/b	01-04-2017	Penjaga Pintu Air		SMA	IPS	1984	31-12-1965	01-03-1997	01-04-1998
42	BUYUNG SASAKA ARPAN, ST.	197110212007011017	III/b	01-10-2017	Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan		S1	Teknik Sipil		21-10-1971	01-01-2007	01-10-2008
43	BAIQ ERNAWATI, SE.	197712032007012011	III/b	01-10-2017	Pengelola Sumber PAD		S1	Ekonomi		03-12-1977	01-01-2007	01-10-2008
44	LALU AZIS FARHAN	196706051998031018	III/b	01-04-2018	Pengelola Sumber Daya Air		STM	Bangunan	1987	05-06-1967	01-03-1998	01-04-1999
45	MURIADI	196412311998031058	III/b	01-04-2018	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang Utara)		SMA	IPA	1985	31-12-1964	01-03-1998	01-04-1999
46	PAIMAN, S.Adm	196712311998031078	III/b	01-04-2018	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan Jonggat		S1	Ilmu Adm. Negara	2012	31-12-1967	01-03-1998	01-04-1999
47	LALU ANDI AHMAD SUPRIADI	197712101998031005	III/b	01-04-2018	Pengadministrasian Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1996	10-12-1977	01-03-1998	01-04-1999
48	LALU SAMSURI, ST.	197612312007011066	III/b	01-10-2018	Pengelola Sumber Daya Air		S1	Teknik Sipil		31-12-1976	01-01-2007	01-10-2008
49	BAIQ NURBAITI, SE.	198112312009012006	III/b	01-10-2018	Pengelola Laporan Keuangan		S1	Ekonomi	2002	31-12-1981	01-01-2009	01-03-2010
50	LIZA HANI SAROYA WARDI, ST. M	198009042015031001	III/b	01-04-2019	Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan		S2	Teknik Sipil	2006	04-09-1980	01-03-2015	
51	BUDIMAN, ST	198112312005011012	III/b	01-04-2020	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil	2015	31-12-1981	01-01-2005	01-03-2006
52	KASPUL HADI, S. Adm.	197906192007011009	III/b	01-10-2020	Pengelola Pemeliharaan Jalan		S1	Ilmu Adm. Negara	2013	19-06-1979	01-01-2007	01-10-2008
53	SRI SURIANINTI, ST.	198003272006042012	III/b	01-10-2020	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang		S1	Teknik Mesin	2003	27-03-1980	01-04-2006	01-05-2007
54	ZIBAN BAKHTIAR, A.Md.	197510102009011004	III/b	01-04-2021	Penguji Lab, tanah, aspal dan beton		D. III	Teknik Mesin	1998	10-10-1975	01-01-2009	01-03-2010
55	LALU ARYA SUGITA, ST	197903262010011004	III/b	01-04-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil	2003	26-03-1979	01-01-2010	11-01-2011
56	SATRIAWANGSA, S.AP	198404152006041008	III/b	01-04-2021	Teknisi Peralatan dan Mesin UPTD Peralatan dan Pengujian		S1	Ilmu Adm. Negara	2003	15-04-1984	01-04-2006	01-05-2007
57	LALU RAHMAN	197112312001121010	III/a	01-04-2018	Pengadministrasian Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1991	31-12-1971	01-12-2001	01-12-2002
58	BAIQ RINA RAHMAWATI, SE	198309242010012003	III/a	01-04-2018	Pengelola Keuangan		S1	Ekonomi Pembangunan	2018	24-09-1983	01-01-2010	01-11-2011
59	MAYA GITA PERTIWI, ST	199510292019032005	III/a	01-03-2019	Analisis Tata Ruang		S1	Teknik Sipil	2018	29-10-1995	01-03-2019	01-03-2020
60	MAHENDRA SUGANDHI, ST	198804152019031002	III/a	01-03-2019	Analisis perencanaan Wilayah Perumahan		S1	Teknik Sipil	2014	28-02-1988	01-03-2019	01-03-2020
61	MUHAMAD REDWAN, S.Adm	198008102008011013	III/a	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Pringgara)		S1	Bahasa	1998	10-08-1980	01-01-2008	01-04-2009
62	KAMIL, SH	197001012007011101	III/a	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Muju II)		S1	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	01-01-1970	01-01-2007	01-10-2008
63	BAIQ ERNAWATI, S.Sos	197901012009012004	III/a	01-04-2019	Pengadministrasian Keuangan		S1	IPS	1997	01-01-1979	01-01-2009	01-03-2010
64	DIAN ANGGRAINI, SE	198203132010012004	III/a	01-04-2020	Pengolah Data Laporan Keuangan		SMU	IPA	2000	13-03-1982	01-01-2010	01-11-2011
65	FATIMATUZZAHRAH, SE	198503282010012007	III/a	01-04-2020	Pengelola Administrasi Keuangan		SMK	Akuntansi	2003	28-03-1985	01-01-2010	01-11-2011
66	JAPARUDIN	196808152001121004	III/a	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		SMU	IPS	2002	15-08-1968	01-12-2001	01-12-2002
67	BURHAN	197112312007011147	III/a	01-04-2021	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SPP	Pertanian & Pemb.	1991	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008
68	BAIQ RUKYATILWATI	197312312007012138	III/a	01-04-2021	Pengadministrasian Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Biologi	1993	31-12-1973	01-01-2007	01-10-2008
69	UBAIDILLAH	197602162012121004	III/a	01-04-2021	Pengadministrasian Keuangan		SMA	Pengetahuan Budaya	1994	16-02-1976	01-12-2012	01-10-2014
70	LALU MUSTIADI	196312312006041022	II/d	01-04-2018	Pengadministrasian Keuangan		SMA A4	Bahasa	1981	31-12-1963	01-04-2006	01-05-2007
71	BAIQ SRI SURYANI	196410012006042001	II/d	01-04-2018	Pengadministrasian Keuangan		SMA A3	IPS	1983	01-10-1964	01-04-2006	01-05-2007
72	MUJIONO	196504302006041001	II/d	01-04-2018	Penjaga Pintu Air (Batujai)		STM	Mesin	1985	30-04-1965	01-04-2006	01-05-2007
73	ADIWIJAYA	196512312007011281	II/d	01-04-2019	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)		SMA	IPS	1986	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
74	BAHARUDIN	197112312007011159	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (BS. 5 Lajut, DI Surabaya)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008
75	SUKAMTO	196801102007011027	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang)		SMEA	Perdagangan	1990	10-01-1968	01-01-2007	01-10-2008
76	AWALUDDIN	196812312007011318	II/d	01-04-2019	Pemelihara Peralatan		SMA	IPS	1968	31-12-1968		
77	MANSYUR	196703212007011017	II/d	01-04-2019	sekertaris/Ajudan		SMA A2	Biologi	1989	21-03-1967	01-01-2007	01-10-2008
78	SAHNAN	197002282007011021	II/d	01-04-2019	Pengawas Bangunan dan Gedung		STM	Bangunan	1989	28-02-1970	01-01-2007	01-10-2008
79	LALU MUHAMAD ALI	197412222007011015	II/d	01-04-2019	Pemelihara Jalan		STM	Bangunan	1993	22-12-1974	01-01-2007	01-10-2008
80	NASIP	196912312007011289	II/d	01-04-2019	Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)		STM	Bangunan	1989	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008



81	ROHIMI	196412312007012149	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum		SMA A3	IPS	1983	31-12-1964	01-01-2007	01-10-2008
82	KISWARA	196612312007011287	II/d	01-04-2019	Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)		STM	Bangunan	1984	31-12-1966	01-01-2007	01-10-2008
83	LALU RAIS ASHARI	196703172007011013	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan		SMA	IPS	1986	17-03-1967	01-01-2007	01-10-2008
84	ASRIJAYA	196412312007011286	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung II, DI Surabaya)		SMA	IPS	1985	31-12-1964	01-01-2007	01-10-2008
85	SAPRUN	196812312007011317	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Bangunan	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
86	LALU SYAMSUL ANWAR	196912312007011285	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A3	IPS	1989	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
87	HIRMAyadi	196912312007011282	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Kepegawaian		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
88	AMRILLAH	197301302007011011	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	30-01-1973	01-01-2007	01-10-2008
89	H. HARAPAN	196312312007011218	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air		SMA	IPS	1983	31-12-1963	01-01-2007	01-10-2008
90	LALU AHMAD ZARKASI	197701012007011037	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)		SMK	Perkantoran	1997	01-01-1977	01-01-2007	01-10-2008
91	SARII	196712312007011309	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Jonggat)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
92	BAIQ NURTI	196412312007012151	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan		SMA	IPS	1983	31-12-1964	01-01-2007	01-10-2008
93	LALU HIRJAN	196812312007011557	II/d	01-04-2019	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		STM	Bangunan	1987	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
94	MUHAMAD MULIAMIN	196812312007011321	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMEA	Perkantoran	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
95	ARJAWI	197112012007011016	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Mujur II)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	01-12-1971	01-01-2007	01-10-2008
96	SRI HARTINI	197408112007012009	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	11-08-1974	01-01-2007	01-10-2008
97	SRI ARTATI	196809292007012031	II/d	01-04-2019	Pengelola Keuangan		SMA A3	IPS	1988	29-09-1968	01-01-2007	01-10-2008
98	M. HUSNI AMRI	197212312007011183	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	31-12-1972	01-01-2007	01-10-2008
99	EVI FEBRIANTY	197502082007011018	II/d	01-04-2019	Pengelola Keuangan		SMA	Ilmu-Ilmu Biologi	1994	08-02-1975	01-01-2007	01-10-2008
100	LALU AGUS PUTRA	197812242007011009	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Kepegawaian		SMU	IPS	1998	24-12-1978	01-01-2007	01-10-2008
101	FATAHULLAH	196312312007011209	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air, (BS II, DI		SMA A4	Bahasa	1984	31-12-1963	01-01-2007	01-10-2008
102	KAMERAN	196512312007011270	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Bangunan	1984	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
103	SUKIMAN	196512312007011265	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS	1985	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
104	MURTAPIUN	196512312007011268	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum (Tata		SMEA	Tata Niaga	1985	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
105	SYAR' I	196512312007011284	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air		SMA	Ilmu-Ilmu Fisik	1991	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
106	JASWADI	196612312007011291	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS	1985	31-12-1966	01-01-2007	01-10-2008
107	SUWARLAN	196402032007011015	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (BIB, 1.2.3. DI Surabaya)		STM	Pertanian	1986	03-02-1964	01-01-2007	01-10-2008
108	MURTAAT	196504052007011028	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (DAM Mesone Batukliang)		SMA	IPS	1986	05-04-1965	01-01-2007	01-10-2008
109	MUHAMAD NASRI	196512312007011271	II/d	01-04-2019	Operator Alat Berat		SMA	IPA	1986	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
110	HERWANDA	196607172007011023	II/d	01-04-2019	Penata Keuangan		SMA	IPA	1986	17-07-1966	01-01-2007	01-10-2008
111	SUARMAN	196712312007011276	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI		SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
112	EROWAN	196712312007011281	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
113	JASMUNI	196712312007011304	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPA	1986	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
114	PATHATUN	196812312007012226	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan		SMA	IPS	1986	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
115	SYAHRUDDIN	196812312007011306	II/d	01-04-2019	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS	1986	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
116	ALI SADIKIN	196712312007011278	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air		STM	Bangunan	1987	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
117	ZAINUDDIN	196501302007011013	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	30-01-1965	01-01-2007	01-10-2008
118	RAHMAT	196912312007011284	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Pengujian		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
119	LALU RIZAL AHMADI	196912312007011290	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Umum (UPT. Jasa Konstruksi)		SMA	Ilmu-Ilmu Fisik	1988	31-12-1969	01-01-2007	01-10-2008
120	SUHERMAN	197012312007011217	II/d	01-04-2019	Pengemudi		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008
121	SUPARDI	197012312007011228	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008
122	SLAMET SUPARDI	196809122007011030	II/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air		SMA A3	IPS	1991	12-09-1968	01-01-2007	01-10-2008
123	SUJATMI	197103262007012015	II/d	01-04-2019	Pengadministrasi Keuangan		SMA A2	Biologi	1991	26-03-1971	01-01-2007	01-10-2008
124	LALU SAIFUL BAHRI	196812312007011323	II/d	01-04-2019	Pemelihara Jalan		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
125	LALU HARLAL	196412312007011610	II/d	01-04-2019	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan		STM	Mesin Produksi	1985	31-12-1964	01-02-2007	01-10-2008
126	SABRI	197802042000031003	II/d	01-10-2019	Pengadministrasi Keuangan		SMA	Paket C	2004	04-02-1978	01-01-2007	01-10-2008
127	MAAD ADNAN	196712312008011098	II/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Renggang		MA	Ilmu-Ilmu Agama	1988	31-12-1967	01-01-2008	01-04-2009
128	LALU TANAUARAN	197012312008011097	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SMA A3	IPS	1988	31-12-1970	01-01-2008	01-04-2009
129	LALU PITRAJAYA	197112312008011065	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SMA A4	Bahasa	1990	31-12-1971	01-01-2008	01-04-2009
130	RUSDI	197212312008011104	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SMA A2	Biologi	1991	31-12-1972	01-01-2008	01-04-2009



131	LALU MUJIMAN	197312312008011073	II/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		MA	IPS	1991	31-12-1973	01-01-2008	01-04-2009
132	MUHAMAD JABIR	197407182008011006	II/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.4	Bahasa	1994	18-07-1974	01-01-2008	01-04-2009
133	MUHAMAD ANDRIAN	197507272008011016	II/d	01-04-2020	Pengawas Jalan dan Jembatan		STM	Bangunan	1994	27-07-1975	01-01-2008	01-04-2009
134	RAHMAN ABDANI	197404052008011019	II/d	01-04-2020	Pengelola Sampel Pengujian		STM	Bangunan	1995	05-04-1974	01-01-2008	01-04-2009
135	LALU AGUS ADNAN	197412312008011068	II/d	01-04-2020	Operator Alat Berat		SMA A.3	IPS	1995	31-12-1974	01-01-2008	01-04-2009
136	NURLAELA	197612312008012038	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Keuangan		STM	Bangunan	1995	31-12-1976	01-01-2008	01-04-2009
137	MOHAMAD ERWAN	197603232008011014	II/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS	1996	23-03-1976	01-01-2008	01-04-2009
138	LALU ASMA'YADI	197706152008011018	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SMA A.3	IPS	1997	15-06-1977	01-01-2008	01-04-2009
139	MUHAMAD NASIR	197710312008011007	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum (Tata Pengelol		SLTA UMUM	IPA	1997	31-10-1977	01-01-2008	01-04-2009
140	BENNY SUKEYRU	197906262008011019	II/d	01-04-2020	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan		SMA	IPA	1997	26-06-1979	01-01-2008	01-04-2009
141	SYAMSURRIJAL	197912122008011024	II/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Di Surabaya)		MA A.3	IPS	1997	22-12-1979	01-01-2008	01-04-2009
142	LALU ISHAK	197912312008011044	II/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA A.3	IPS	2003	31-12-1979	01-01-2008	01-04-2009
143	LALU MISBAN	197812312008011048	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		MA	IPS	1998	31-12-1978	01-01-2008	01-04-2009
144	LALU ARIF SUSBANDI	197910302008011008	II/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMK	Akuntansi	1998	02-03-1979	01-01-2008	01-04-2009
145	LALU RONI SATRIA	197912012008011009	II/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.4	Bahasa	1998	01-12-1979	01-01-2008	01-04-2009
146	SAMSURIYANI	198002252008012016	II/d	01-04-2020	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS	1998	25-02-1980	01-01-2008	01-04-2009
147	AWALUDIN	198008172008011018	II/d	01-04-2020	Pengelola Data		STM	Bangunan	1999	17-08-1980	01-01-2008	01-04-2009
148	DWI ARIYANTI IWANA	198112252008012012	II/d	01-04-2020	Pengelola Sumber Daya Air		STM	Bangunan	1999	25-12-1981	01-01-2008	01-04-2009
149	LINDA SARI	198208302008012015	II/d	01-04-2020	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		SMA	IPA	2000	30-08-1982	01-01-2008	01-04-2009
150	JAZARI AHMAD	198006172008011020	II/d	01-04-2020	Operator Alat Berat		SMA A.3	IPS	2001	17-06-1980	01-01-2008	01-04-2009
151	DEDY ZULKARNAIN	198212312008011034	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SMA A.3	IPS	2001	31-12-1982	01-01-2008	01-04-2009
152	LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL	197012312008011140	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air							
153	MUHAMAD MANAN	196812312009011022	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Pengujian		SMEA	Perdagangan	1988	31-12-1968	01-01-2009	01-03-2010
154	ABDUL HAPIZ	197003132009011002	II/d	01-04-2021	Pengelola Pemeliharaan Jalan		STM	Bangunan	1990	13-03-1970	01-01-2009	01-03-2010
155	BAIQ NUR ASIAH	197412312009012004	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	IPS	1993	31-12-1974	01-01-2009	01-03-2010
156	SYAFI 'I	198011152009011005	II/d	01-04-2021	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMK	Pariwisata	2001	15-11-1980	01-01-2009	01-03-2010
157	FATHUR	196612312009011012	II/d	01-04-2021	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS	1986	31-12-1966	01-01-2009	01-03-2010
158	LALU FATHUL HIDAYAT	197706132009011004	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1996	13-06-1977	01-01-2009	01-03-2010
159	LALU SUYATNO	198110232009011004	II/d	01-04-2021	Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan		SMK	Bangunan	2000	23-10-1981	01-01-2009	01-03-2010
160	RUPLAN	198207182009011004	II/d	01-04-2021	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		MA	IPS	2000	18-07-1982	01-01-2009	01-03-2010
161	LALU KARYA SANTIKA	198209022009011008	II/d	01-04-2021	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMU	Bahasa	2001	02-09-1982	01-01-2009	01-03-2010
162	MANGKU BUANA SARDI	198412312009011011	II/d	01-04-2021	Penjaga Pintu Air (BPY 2		MA		2002	31-12-1984	01-01-2009	01-03-2010
163	MASKAM	19820315 2009011006	II/d	01-04-2021	Penjaga Pintu Air		SMA	sMA	2000	15-03-1982	01-01-2009	01-03-2010
164	JUNADI	196312311997031033	II/c	01-10-2017	Penjaga Pintu Air		SMP		1981	31-12-1963	01-03-1997	01-04-1998
165	MUNADI	197307072009011004	II/c	01-10-2017	Pengelola Sumber Daya Air		STM	Bangunan	1993	07-07-1973	01-01-2009	01-03-2010
166	BAIQ REHANA	197302062010012001	II/c	01-04-2018	Pengadministrasi Umum		SMEA	Perdagangan	1991	06-02-1973	01-01-2010	01-11-2011
167	LALU IMAM SUMAWI	198205282010011005	II/c	01-04-2018	Penjaga Pintu Air		SMU	IPS	2000	28-05-1982	01-01-2010	01-11-2011
168	KURNIATI	197612312010012002	II/c	01-04-2018	Petugas Teknologi Informasi		SMA A.3	IPS	1994	31-12-1976	01-01-2010	01-11-2011
169	INDRA EKAYANTI	197801112010012006	II/c	01-04-2018	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS	1996	11-01-1978	01-01-2010	01-11-2011
170	ROSMAYATI	197812132010012001	II/c	01-04-2018	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS	1997	13-12-1978	01-01-2010	01-11-2011
171	BAIQ NILUWATI	197812312010012003	II/c	01-04-2018	Pengadministrasi Keuangan		MA		1997	31-12-1978	01-01-2010	01-11-2011
172	UYUL MARTA DITIA ATMAJA	197907012010011003	II/c	01-04-2018	Penjaga Pintu Air		SMU	IPA	1998	01-07-1979	01-01-2010	01-11-2011
173	BADARUDIN	197907112010011011	II/c	01-04-2018	Pengawas Jalan dan Jembatan		SMK		1999	11-07-1979	01-01-2010	01-11-2011
174	HIDAYANTI	198107222010012003	II/c	01-04-2018	Pengadministrasi Pengujian		SMU	IPS	1999	22-07-1981	01-01-2010	01-11-2011
175	DITYA EDWIN EKAYANA	198308312010011003	II/c	01-04-2018	Pemelihara Jalan		SMK		2001	31-08-1983	01-01-2010	01-11-2011
176	SULISTIANINGSIH	198403302010012006	II/c	01-04-2018	Pengolah daftar Gaji		MA		2002	30-03-1984	01-01-2010	01-11-2011
177	BAIQ SRI ULAYANTI	198408172010012006	II/c	01-04-2018	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS	2002	17-08-1984	01-01-2010	01-11-2011
178	HURIAH	198206042010012007	II/c	01-04-2018	Pengadministrasi Keuangan		SMK		2003	04-06-1982	01-01-2010	01-11-2011
179	LALU MUHAMAD PAIZAN	198504202010011008	II/c	01-04-2018	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		SMA	IPA	2004	20-04-1985	01-01-2010	01-11-2011
180	LALU JUNAEADI	198606292010011003	II/c	01-04-2018	Pengelola Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS	2004	29-06-1986	01-01-2010	01-11-2011
181	IDAYANTI	198210212010012005	II/c	01-04-2018	Pengadministrasi Keuangan		SMU	IPS	2002	21-10-1982	01-01-2010	01-11-2011
182	M. NUR HIDAYAT	198402212010011005	II/c	01-04-2018	Petugas Teknologi Informasi		SMU	IPS	2002	21-02-1984	01-01-2010	01-11-2011
183	KUSNAWIJAYA	197304252007011019	II/c	01-10-2018	Teknisi Kecipatarkayaan		STM	Bangunan	1992	25-04-1973	01-01-2007	01-06-2008
184	KABUL	196712312007011301	II/c	01-10-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMAA.2	Biologi	1987	31-12-1967	01-01-2007	01-06-2008
185	NONOK IRHAM	197503102007011014	II/c	01-10-2020	Petugas Teknologi Informasi		SMAA.2	Biologi	1995	10-03-1975	01-01-2007	01-06-2008
186	BAHCTIAR	196312312007011213	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air		Paket C		2008	31-12-1963	01-01-2007	01-06-2008
187	SUPARDI	196612312007011302	II/c	01-10-2020	Pengadministrasi Umum		Paket C		2008	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008
188	I KETUT BUDAYA ADNYANA	196712212007011020	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air		Paket C		2008	21-12-1967	01-01-2007	01-06-2008
189	RUMASE	196512312007011279	II/c	01-10-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		Paket C		2010	31-12-1965	01-01-2007	01-06-2008
190	JAHRI	197412312007011113	II/c	01-10-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		Paket C		2010	31-12-1974	01-01-2007	01-06-2008
191	MUHAMAD HAMIRI	197512312012121011	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Pengujian		MA	Ilmu-Ilmu Agama	1993	31-12-1975	01-12-2012	01-10-2014
192	MAHSUN	197412312012121031	II/c	01-04-2021	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Bangunan	1994	31-12-1974	01-12-2012	01-10-2014
193	AKHMAD C	197012311997031042	II/c	01-04-2021	Penjaga Pintu Air		Paket B		2007	31-12-1970	01-03-1997	01-04-1998
194	NISPURWADI	198110102012121003	II/c	01-04-2021	Pemeliharaan Peralatan		SMA	IPS	1999	10-10-1981	01-12-2012	01-10-2014
195	MUHAMMAD PAIZAN	198112312012121003	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA					
196	LALU RAMLI	196407152006041002	II/b	01-04-2018	Penjaga Pintu Air		SMP		1982	15-07-1964	01-04-2006	01-05-2007
197	LALU MUHAMAD ZAELANI	197212192014071002	II/b	01-10-2018	Pengadministrasi Keuangan		SMA	Ilmu-Ilmu Biologi	1991	19-12-1972	01-07-2014	01-12-2016
198	LALU BUDI HERMAWAN	197506292014071001	II/b	01-10-2018	Teknisi Gedung/Bangunan		SMA	Ilmu-Ilmu Biologi	1994	29-06-1975	01-07-2014	01-12-2016
199	ASMUJI	196412312007011278	II/b	01-04-2019	Penjaga Pintu Air		SMP		1982	31-12-1964	01-01-2007	01-06-2008
200	AKHIMUDIN	196612312007011285	II/b	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP		1985	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008
201	LALU SUHAIDI	196912312007011277	II/b	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung Dao Di Batukliang)		SMA	Ilmu-Ilmu Fisik	1985	31-12-1969	01-01-2007	01-06-2008
202	SAIDI	196312312007011215	II/b	01-04-2019	Penjaga Pintu Air		SMP		1979	31-12-1963	01-01-2007	01-06-2008
203	RAMDAN	196712312007011302	II/b	01-04-2019	Penjaga Pintu Air (DAM Bunut Batukliang)		SMA	Pengetahuan Budaya	1988	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
204	MINARIM	196612312007011299	II/b	01-10-2019	Penjaga Pintu Air		SMP		1983	31-12-1966	01-01-2007	01-06-2008
205	SIDIK	197112312007011151	II/b	01-10-2019	Penjaga Pintu Air		SMP		1988			



206	KHAIRIL ANWAR	197612282008011010	II/b	01-10-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1990	28-12-1976	01-01-2008	01-04-2009
207	MAHDI	196512312008011071	II/b	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1986	31-12-1965	01-01-2008	01-04-2009
208	ABDUL AZIS	196912312008011106	II/b	01-04-2020	Pramu Kantor			SLTP		1986	31-12-1969	01-01-2008	01-04-2009
209	BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH	19740425 200801 2 00	II/b	01-04-2020	Pengadministrasi Persuratan			SLTP		1991	25-04-1974	01-01-2008	01-01-2008
210	HAYIN	197312312008011071	II/b	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			PAKET C		2010	31-12-1973	01-01-2008	01-04-2009
211	MANSUR BUDIKA	197402092008011011	II/b	01-04-2020	Operator Alat Berat			Paket C		1994	09-02-1974	01-01-2008	01-04-2009
212	SASIH	198109242009011007	II/b	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			Paket C		1995	24-09-1981	01-01-2009	01-03-2010
213	AHMAD BADAWI	198612312009011004	II/a	01-10-2017	Operator Alat Berat			SLTP		2002	31-12-1986	01-01-2009	01-03-2010
214	ROMI IRWANTO	198107232010011002	II/a	01-04-2018	Pranata Pasukan Pengamanan			SLTP		1999	23-07-1981	01-01-2010	01-11-2011
215	LALU SAHRIP	196412312006041023	II/a	01-10-2018	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SD		1977	31-12-1964	01-04-2006	01-05-2007
216	LALU ZULKIFLI	197612312008011052	II/a	01-04-2020									
217	QORIMAH	197203182008012013	II/a	01-04-2020	Pengadministrasi Persuratan			Paket C		2006	18-03-1972	01-01-2008	01-04-2009
222	MARZUKI	197212312009011010	II/a	01-04-2021	Penjaga Pintu Air (Embung Paskar Janapria)			SD		1981	31-12-1972	01-01-2009	01-03-2010
218	WAHYU HIDAYAT	198210102009011010	II/a	01-04-2020	Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA		1995	10-10-1982	01-01-2009	01-03-2010
219	SAIHUL IMAN	196412312007011289	II/a	01-10-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SLTP	PAKET B	2007	31-12-1964	01-01-2007	01-06-2008
220	MOHDAN	196412312006041024	I/d	01-04-2018	Penjaga Pintu Air			SD		1976	31-12-1964	01-04-2006	01-05-2007
221	SAIRIN	196412312006041022	I/d	01-04-2018	Penjaga Pintu Air			SD		1975	31-12-1964	01-04-2006	01-05-2007
223	SAHRI	196712312007011306	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1981	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
224	LALU ISHAK	197012312007011223	I/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SD		1985	31-12-1970	01-01-2007	01-10-2008
225	I WAYAN PUJIARTA	197602232007011007	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1988	23-02-1976	01-01-2007	01-10-2008
226	MAHISUN	197212312007011177	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1985	31-12-1972	01-01-2007	01-10-2008
227	RAMDAN	198009252007011009	I/d	01-04-2019	Pranata Taman			SMP		1995	25-09-1980	01-01-2007	01-10-2008
228	LALU MAKMUN	196812312007011308	I/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Di Surabaya)			SMP		1985	31-12-1968	01-01-2007	01-10-2008
229	MURDI	196412312007011284	I/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SD		1976	31-12-1964	01-01-2007	01-10-2008
230	BASTAH	196512312007011280	I/d	01-04-2019	Pengadministrasi Pengujian			SD		1979	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
231	JUMAHAH	196712312007011293	I/d	01-04-2019	Operator Alat Berat			SD		1980	31-12-1967	01-01-2007	01-10-2008
232	NURIDIN	197112312007011155	I/d	01-04-2019	Penjaga Pintu Air			SD		1986	31-12-1971	01-01-2007	01-10-2008
233	LALU SUKARDAN	196512312007011283	I/d	01-04-2019	Pramu Kantor			PAKET B		2008	31-12-1965	01-01-2007	01-10-2008
234	LALU ANWAR	197712312008011065	I/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SD		1991	31-12-1977	01-01-2008	01-04-2009
235	MASRIK	197112312008011063	I/d	01-04-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SD		1985	31-12-1971	01-01-2008	01-04-2009
236	AWALUDIN	197112312010011011	I/c	01-04-2018	Pranata Pasukan Pengamanan			SD		1986	31-12-1971	01-01-2010	01-11-2011
237	SALIM	196507012012121004	I/c	01-04-2021	Penjaga Pintu Air			SD		1977	01-07-1965	01-12-2012	01-10-2014
238	SUMARDAN	197303182012121002	I/c	01-04-2021	Pramu Kebersihan			SD		1988	18-03-1973	01-12-2012	01-10-2014
239	SUPARDI	196412312012121041	I/c	01-04-2021	Pengemudi			SD		1979	31-12-1964	01-12-2012	01-10-2014
240	HUSEN	196712312014071041	I/b	01-10-2018	Penjaga Pintu Air			SD		1982	31-12-1967	01-07-2014	01-12-2016
241	ARPAN	196512312014071038	I/b	01-10-2018	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			MI		1978	31-12-1965	01-07-2014	01-12-2016



Jumlah pegawai untuk mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok adalah sebanyak 241 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
PENDIDIKAN, JABATAN, PANGKAT / GOL DAN ESELON  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KEADAAN TRIWULAN : 3 (SATU) TAHUN 2021**

**a. Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	S3	0
2	S2	9
3	S1	41
4	SM / D.I / D.III / D.IV	1
5	SLTA	151
6	SLTP	19
7	SD	20
	<b>JUMLAH</b>	<b>241</b>

**b. Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan**

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina ( Golongan IV )	4
2	Penata ( Golongan III )	65
3	Pengatur ( Golongan II )	151
4	Juru ( Golongan I )	21
	<b>JUMLAH</b>	<b>241</b>



### c. Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO.	PENDIDIKAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1	Diklat Pim Tingkat II ( Spamem )	1
2	Diklat Pim Tingkat III ( Spama )	3
3	Diklat Pim Tingkat IV ( Adumlah / Sepada / Adum )	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>

### d. Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO.	ESELONERING	JUMLAH
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	4
4	Eselon IV a	17
5	Eselon IV.b	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan pada upaya peningkatan wawasan, keahlian dan kemampuan manajerial. Selanjutnya, terkait peningkatan etos kerja dan disiplin aparatur diarahkan pada pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur yang terstandardisasi termasuk pengembangan motivasi pegawai.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien dan terarah. Permasalahan daya dukung sarana prasarana kelembagaan merupakan isu sentral yang dominan terdapat di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Lombok Tengah. Hal tersebut dikarenakan masih



terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Selain aspek Sarana prasarana pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi juga oleh kondisi asset yang dimiliki. Adapun asset yang dimiliki Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan ke 2 (dua) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Nilai	Jumlah Item
		RP.	
1.	KIB A	118.884.942.82	236
2.	KIB B	16.485.934.69	673
3.	KIB C	90.089.413.52	310
4.	KIB D	1.825.079.749.96	1.843
5.	KIB E	42,687.50	6
<b>JUMLAH</b>		<b>2.050.582.728.486.70</b>	<b>3.068</b>



## 2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagai salah satu SKPD teknis yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Maka capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 dapat dijelaskan melalui tabel sebaagai berikut :

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lpmbok Tengah

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Debit air (Ls)				23.108	23.108	23.108	23.108	23.108	23.108	23.108	23.108	23.108		100	100	100	100	
	Cakupan Layanan Irigasi (Ha)				13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123		100	100	100	100	



2.	Persentase jalan dalam kondisi mantap/baik				68,24	70,62	71,85	74,32	75,79	184,5	69,74	67,675	67,55		270,36	98,75	94,19	90,89	
3.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih				74,5	76	78	80	82	70	75	90,18	78,16		93,95	98,68	116,28	97,7	
4.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW				78,47	80,32	82,54	84,36	86,71	50	50	81,04	81,04		50	50	98,61	96,06	
5.	Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR)				C	C	B	B	B	C	C	C	C						



Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa indikator Debit air dengan target tiap tahunnya dari target tahun pertama sampai dengan tahun ke 5 (lima) tidak mengalami perubahan target yaitu sebesar 23.108 L/s dengan realisasi tiap tahunnya sebesar 23.108 L/s dengan rasio capaian kinerja sebesar 100%, ini dikarenakan kita akan mempertahankan jumlah debit air irigasi yang tersedia sesuai alokasi air dari BWS Nusa Tenggara I/ Jumlah Debit pada Semua Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten (69 DI). Sedangkan untuk indikator,
2. Cakupan layanan irigasi dengan target pertahunnya sebesar 13.123 Ha dengan realisasi pertahunnya sebesar 13.123 Ha, dengan rasio capaian kinerja sebesar 100%, dimana realisasinya tidak mengalami peningkatan dan penurunan dikarenakan kita mempertahankan luas areal Cakupan Layanan Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
3. Indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap/baik dari table diatas dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dimana target Renstra sebesar 68,24% dengan realisasi sebesar 184,5% dimana rasio capaiannya sebesar 270,36% dimana ditahun pertama pemerintah daerah lebih memfokuskan anggaran untuk penanganan jalan.
4. Indikator Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih Dari table diatas dapat kita lihat bahwa ditahun ke-3 (tiga) target sebesar 78% sedangkan untuk realisasinya sebesar 90,18% dengan rasio capaiannya melebihi 100% karena pada tahun ke-3 (tiga) ini kebutuhan masyarakat akan air bersih meningkat.
5. indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW dengan realisasi tahun 2020 sebesar 81,04% dari target tahun 2020 sebesar 84.36% sehingga prosesntase realisasinya menjadi 96,06%, ini artinya tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 1). Kurangnya sosialisasi, 2). Kesadaran masyarakat terhadap informasi tata ruang,
6. indikator Nilai SAKIP SKPD (DINAS PUPR) dimana target tahun 2019



dengan nilai B tapi realisasinya masih C hal ini disebabkan karena masih kurang sinkronnya antara laporan dengan data pendukung yang dilampirkan. Cara yang harus dilakukan untuk merealisasikan capaian sesuai target adalah dengan meningkatkan kualitas laporan.

7. Untuk realisasi tahun tahun ke-5 (lima) dimana merupakan tahun terakhir Renstra dimana pada saat penyusunan Renstra 2021-2026 masih dalam masa pelaksanaan kegiatan dan belum berakhir sehingga belum bisa menentukan realisasi besar capaian kinerjanya.





**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					KABUPATEN LOMBOK TENGAH										RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	1	2	3	4	5	REALISASI ANGGARAN PADA KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					ANGGARAN	REALISASI	
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
<b>SEKRETARIAT</b>																		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	1.074.023.000	869.128.000	1.492.319.550	1.186.732.550	-	960.279.651	771.691.268	132.024.361	1.026.471.403	86,50	89,41	87,86	93,82	86,50			3.762.984.700	2.122.243.049
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127.693.000	165.373.000	198.973.000	253.665.000		104.245.731	99.297.588	132.024.361	177.295.239	69,89	81,64	60,04	66,35	69,89			643.549.600	429.466.404,09
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perfengkapan Kantor	317.820.000	76.375.000	229.005.000	79.493.000		315.455.000	74.115.000	223.256.300	78.710.000	99,02	99,26	97,04	97,49	99,02			448.437.000	439.172.399,02
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	454.480.000	462.240.000	767.820.000	655.200.000		398.785.000	439.260.000	751.820.000	572.819.000	87,43	87,75	95,03	97,92	87,43			1.976.156.000	1.843.656.087
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	82.570.000	198.521.550	153.039.550			79.509.340	195.798.000	152.700.000	99,78		96,29	98,63	99,78			434.131.100	428.007.439,78
5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	174.030.000	82.570.000	98.000.000	45.335.000		141.793.920	79.509.340	97.261.396,00	44.947.164	99,14	81,48	96,29	99,25	99,14			260.711.000	250.076.783,14
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	331.572.700	309.888.000	588.474.000	228.491.000	-	254.357.300	265.231.914	510.089.528	174.562.750	-	76,71	85,59					1.193.167.540	1.000.755.652,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			390.000.000			-	-	-	-		-	-	-					
1 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung	65.228.700	76.680.000	284.276.000	50.000.000		63.650.000	75.576.000	278369000	-		97,58	98,56	97,92	-			424.001.740	366.675.000,00
2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	266.344.000	233.208.000	304.198.000	178.491.000		190.707.300	189.655.914	231720528	174562750		71,60	81,32	76,17	97,80			769.165.800	634.080.652,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	272.249.000	297.466.000	233.810.000	178.491.000	-	248.305.280	285.286.450	219.277.550	174.562.750	-		85,59	93,78	97,80			764.216.800	728.787.806,00
1 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.395.000	75.815.000	71.410.000	178.491.000		78.993.400	74.051.500	67980000	174562750		97,05	97,67	95,20	97,80			341.995.000	332.392.930,00
2 Monitoring Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	190.854.000	221.651.000	162.400.000			169.311.880	211.234.950	151297550			88,71	95,30	93,16	-			422.221.800	396.394.876,00

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



-																	
<b>BIDANG BINA MARGA</b>																	
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>		<b>175.793.079.752</b>	<b>89.995.407.936</b>	<b>90.994.827.090</b>	<b>25.607.763.972</b>	-	<b>169.475.533.416</b>	<b>86.965.457.559</b>	<b>85.839.169.811</b>	<b>23.074.919.970</b>	-	<b>96,41</b>	<b>96,63</b>	<b>94,33</b>		<b>241.756.614.948</b>	<b>229.774.654.023</b>
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	1.027.800.000	427.700.000	516.192.000	200655000		1.024.744.550	426.210.000	468670500	189519000		99,70	99,65	90,79		<b>1.350.107.000</b>	<b>1.289.348.410</b>
2	Pembangunan Jalan	174.765.279.752	88.020.882.936	87.645.281.640	25299772972		168.450.788.866	85.063.663.595	82993557738	22778542970		96,39	96,64	94,69		<b>235.918.993.498</b>	<b>224.525.922.076</b>
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	-	177.750.000	316.917.000	107336000		-	176.408.400	313098000	106858000		-	99,25	98,79			
4	Pembangunan Jembatan	-	1.369.075.000	2.516.436.450	0		-	1.299.175.564	2063843573	0		-	94,89	82,01			
<b>PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN</b>		<b>6.074.042.500</b>	<b>4.672.511.000</b>	<b>6.452.977.800</b>	<b>4.085.043.500</b>	-	<b>5.614.261.710</b>	<b>4.335.926.500</b>	<b>13.568.751.075</b>	<b>4.053.902.700</b>	-	<b>90,96</b>	<b>92,80</b>	<b>92,74</b>	<b>96</b>	<b>16.425.340.800</b>	<b>23.081.432.617,00</b>
11	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	92.150.000	109.850.000	147.263.300	63.250.000		89.130.950	100.025.000	7.435.339.156	60.338.000		96,72	91,06	82,80	95,40	<b>338.793.300</b>	<b>7.613.528.346,00</b>
12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	3.663.840.000	3.954.711.000	5.559.014.000	3.814.868.500		3.328.501.660	3.794.229.500	5.433.876.100	3.788.775.500		90,85	95,94	97,75	99,32	<b>14.061.361.500</b>	<b>13.682.581.432,00</b>
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan	2.318.052.500	607.950.000	746.700.500	206.925.000		2.196.629.100	441.672.000	699.535.819	204.789.200		94,76	72,65	93,68	98,97	<b>2.025.186.000</b>	<b>1.785.322.839,00</b>
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN</b>		<b>78.955.900</b>	<b>92.000.000</b>	<b>317.550.000</b>	<b>107.650.000</b>	-	<b>78.951.850</b>	<b>88.879.500</b>	<b>158.823.750</b>	<b>105.113.000</b>	-	<b>99,99</b>	<b>96,61</b>	<b>50,02</b>		<b>532.991.180</b>	<b>368.606.620,00</b>
	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	78.955.900	92.000.000	317.550.000	107.650.000		78.951.850	88.879.500	158823750	105113000		99,99	96,61	50,02	97,64	<b>532.991.180</b>	<b>368.606.620,00</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA &amp; PRASARANA KEBINAMARGAAN</b>		<b>1.110.052.025</b>	<b>914.503.200</b>	<b>925.477.000</b>	<b>665.284.000</b>	-	<b>1.055.053.343</b>	<b>793.472.550</b>	<b>787.952.769</b>	<b>524.550.663</b>	-	<b>95,05</b>	<b>86,77</b>	<b>85,14</b>	<b>78,85</b>	<b>2.727.274.605</b>	<b>2.316.986.650,60</b>
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	1.110.052.025	914.503.200,00	925.477.000	665.284.000		1.055.053.343	793.472.550	787.952.769	524.550.663		95,05	86,77	85,14	78,85	<b>2.727.274.605</b>	<b>2.316.986.650,60</b>
-																	

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BIDANG SUMBER DAYA AIR																	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA																	
	26.977.346.725	14.375.663.020	24.725.485.000	16.052.385.600	-	21.477.195.786	12.808.705.461	20.646.754.981	13.159.681.690	-	79,61	89,10	83,50	81,61		60.549.002.965	50.910.581.289,20
16	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	754.660.000	789.542.500	709.800.000	191.565.000	547.205.410	758.258.500	449.545.062	191.328.000		72,51	96,04	63,33	99,88		1.841.839.500	1.508.572.644,00
17	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	23.928.083.775	11.277.000.000	19.021.635.000	13.811.436.500	18.763.857.686	10.013.734.840	16.517.113.369	11.092.996.545		78,42	88,80	86,83	80,32		48.895.688.255	41.376.616.291,20
18	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah DiBangun	1.447.847.950	1.248.458.020	1.195.000.000	1.155.047.100	1.342.083.260	1.191.777.050	1.192.678.100	1.094.753.600		92,70	95,46	99,81	94,78		3.888.074.710	3.747.625.402,00
19	Peberdayaan Petani Pemakai Air	846.755.000	1.060.662.500	3.799.050.000	894.337.000	824.049.430	844.935.071	2.487.418.450	780.603.545		97,32	79,66	65,47	87,28		5.923.400.500	4.277.766.952,00
BIDANG PENATAAN RUANG																	
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG																	
	252.657.000	570.070.000	697.385.625	241.463.000	-	252.028.433	548.056.499	687.304.335	240.640.715,00		99,75	96,14	98,55	99,66		1.559.450.025	1.526.407.235,60
20	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang	252.657.000	570.070.000	697.385.625	241.463.000	252.028.433	548.056.499,00	687.304.335,00	240.640.715,00		99,75	96,14	98,55	99,66		1.559.450.025	1.526.407.235,60
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG																	
	174.915.000	203.125.000	165.094.375	89.738.000	-	170.589.842	199.813.314	154.960.645	88.860.572,00		98,45	98,37	98,37	99,02		492.940.375	477.752.499,40
21	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	174.915.000	203.125.000	165.094.375	89.738.000	170.589.842	199.813.314	154.960.645	88.860.572,00		98,45	98,37	98,37	99,02		492.940.375	477.752.499,40
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG																	
	172.428.000	161.485.000	160.300.000	99.321.000	-	170.589.842	161.469.507	158.887.957	98.580.440,00		98,93	99,99	99,12	99,25		455.591.600	453.055.872,40
22	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian	172.428.000	161.485.000	160.300.000	99.321.000	170.589.842	161.469.507	158.887.957	98.580.440,00		98,93	99,99	99,12	99,25		455.591.600	453.055.872,40

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BIDANG CIPTA KARYA																		
PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA GEDUNG KANTOR	63.358.838.000	188.069.499.800	162.195.173.125	62.598.236.168	-	57.576.093.270	117.146.206.262	147.927.966.410	59.100.554.872	-	90,87	62,29	91,20				425.534.676.693	335.689.946.198,00
23 Pembangunan Gedung Kantor	63.358.838.000	188.069.499.800	162.195.173.125	62.598.236.168		57.576.093.270	117.146.206.262	147.927.966.410	59.100.554.872		90,87	62,29	91,20				425.534.676.693	335.689.946.198,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KECIPTAKARYAAN	817.886.500	932.486.500	1.108.142.000	171.220.000	-	623.882.300	770.117.882	1.102.172.897	164.916.500	-	76,28	82,59	99,46	94,41			2.375.425.800	2.161.983.739,00
24 Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan	817.886.500	932.486.500	1.108.142.000	171.220.000		623.882.300	770.117.882	1.102.172.897	164.916.500		76,28	82,59	99,46	94,41			2.375.425.800	2.161.983.739,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM	8.991.380.250	16.927.431.000	15.540.468.750	17.158.130.000	-	8.365.198.414	15.300.927.438	14.821.710.036	16.788.912.397	-	93,04	90,39	96,32	96,32			51.424.305.800	48.584.589.553,80
25 Penyediaan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat	8.991.380.250	16.927.431.000	15.540.468.750	17.158.130.000		8.365.198.414	15.300.927.438	14.821.710.036	16.788.912.397		93,04	90,39	96,32	96,32			51.424.305.800	48.584.589.553,80
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	98.548.200	28.929.250	15.540.468.750	-	-	69.618.950	24.704.250	-	-	-	70,64	85,40	-	-			15.589.107.640	38.628.040,00
26 Pengendalian dampak Resiko Pencemaran Lingkungan	98.548.200	28.929.250	15.540.468.750			69.618.950	24.704.250				70,64	85,40	-	-			15.589.107.640	38.628.040,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN JASA KONTRUKSI	-	65.900.000	-	-	-	-	44.177.651	-	-	-	-	67,04	-	-			65.900.000	44.177.651,00
Pelayanan dan Peningkatan Jasa Kontruksi	-	65.900.000	-	-	-	-	44.177.651	-	-	-	-	67,04	-	-			65.900.000	44.177.651,00



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4.1. Tantangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah pada tataran implementasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 dikaitkan dengan kajian lingkungan hidup strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas periode 5 (lima) tahun mendatang yang diformulasikan pada RENSTRA 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Keberlanjutan daya dukung SDA terkait dengan menurunnya kondisi catchment area, berkurangnya ketersediaan air baku untuk mendukung kebutuhan air multisektor, pengendalian alih fungsi lahan pertanian beririgasi, pengendalian daya rusak air dan belum optimalnya upaya mitigasi maupun adaptasi bidang Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
- b. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dalam kondisi mantap yang mendukung sistem transportasi wilayah untuk keselamatan dan kenyamanan, peningkatan kesadaran dan peran masyarakat pengguna jalan maupun pemanfaat jalan yang berbasis gender maupun dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam penyelenggaraan jalan.
- c. Memperluas akses penyediaan air minum yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan, serta membangun prasarana gedung publik untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas penataan ruang, kebijakan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- e. Peningkatan kualitas penataan ruang, kebijakan perencanaan, pengendalian dan Peningkatan kualitas hasil uji material, pelayanan



peralatan berat, dan pemberdayaan penyedia/pengguna jasa konstruksi/konsultasi.

#### 2.4.2. Peluang

Peluang yang memberikan kemungkinan terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- a. Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang peningkatan status jalan poros desa menjadi jalan kabupaten, sehingga akses jalan yang terisolir dan belum mendapatkan penanganan dapat tertangani dengan baik.
- b. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 Ayat (5) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Terkait dengan hal tersebut, daerah dapat mengajukan Revisi RTRW dengan pertimbangan perkembangan wilayah terbaru, sehingga nantinya daerah tidak mengalami kesulitan dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang.
- c. Adanya program nasional yaitu Gerakan 100-0-100 menargetkan penyediaan 100% akses air minum aman, yang menggalang stakeholder termasuk pemerintah daerah untuk mendukung program dimaksud sehingga memberikan potensi bagi daerah dalam mendapatkan pembiayaan tambahan sarana prasarana air bersih diluar APBD sehingga pembangunan prasarana fisik untuk air bersih dapat dioptimalkan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.





## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tugas, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar. Sementara, sisi dinamis dari persoalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari. Secara umum permasalahan pembangunan terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan administrasi keuangan belum optimal	kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat	belum optimal, belum optimalnya data dan informasi Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah yang terintegrasi



2.	Cakupan layanan irigasi yang belum berfungsi secara optimal	Minimnya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi serta belum terintegrasinya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi secara representatif	Defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI/water District di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur, serta kurang optimalnya koordinasi antar GP3A dan daya dukung masyarakat petani dalam pengelolaan air irigasi.
3.	Belum optimalnya kondisi keteknisan prasarana irigasi untuk pelayanan air	Pola penanganan perbaikan kondisi irigasi belum dalam kesatuan sistem	Belum teridentifikasinya kondisi dan fungsi jaringan dalam pelayanan air
4.	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah	Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Penambahan ruas dan panjang jalan dengan peningkatan status jalan
5.	Cakupan layanan air bersih masih minim	Masih kurangnya instalasi jaringan layanan air minum melalui jaringan perpipaan	Keterbatasan ketersediaan sumber daya air (sumber mata air)
6.	Belum optimalnya pembangunan prasarana pelayanan publik dan gedung pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	Masih adanya beberapa OPD yang memiliki gedung untuk tugas pelayanan	Keterbatasan anggaran untuk membangun gedung pemerintah (Mall Pelayanan Publik)
7.	Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang	Banyak terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang	RTRW perlu direvisi dan belum adanya detail tata ruang untuk pengaturan
8.	Belum optimalnya pelayanan publik terkait dengan fungsi tugas pelayanan peralatan dan pengujian material	Jumlah peralatan yang terbatas dan sebagian besar diatas umur ekonomis	Belum optimalnya pemeliharaan dan pengadaan peralatan





### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditunjukkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dimengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.

#### 3.2.1 VISI

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 -2026 dirumuskan sebagai berikut:

***“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)”***





Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU JAYA ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- **Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa *Akhlaqul Karimah* masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (*The Heart of Lombok*).

Dalam hal ini peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, melalui Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “*Beriman, Sejahtera, Bermutu, maju dan Berbudaya*” melalui kegiatan yang dapat membangkitkan minat serta kondisi infrastruktur yang bermutu, sehingga masyarakatnya akan beriman sejahtera, maju dan berbudaya.



### 3.2.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah akan ditempuh melalui misi ke – 3 (tiga) dan misi Ke- 4 (empat) pembangunan daerah yakni sebagai berikut:

- Misi ke 3 (tiga) **“Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Bersih.”**
- Misi ke-4 (empat) **“Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas”**

Misi ke-3 (tiga) menekankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public yang akan diwujudkan dengan pengembangan mall pelayanan public sedangkan untuk misi ke-4 (empat) lebih menekankan kepada meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan yang akan diwujudkan dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan cakupan layanan irigasi kabupaten dan meningkatkan akses air minum aman bagi masyarakat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang agar infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui: perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum Serta pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7. tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.





VISI :		
MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)		
MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI KE-3 (tiga) Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Bersih	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public
MISI KE-4 (EMPAT) Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah 2. Meningkatnya cakupan layanan system irigasi Kabupataen 3. Meningkatnya akses air mium aman

### 3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a) Urusan Pekerjaan Umum
  - 1) Program Penyelenggaraan Jalan
  - 2) Program Penataan Jalan Desa
  - 3) Program Pengelolaan SDA
  - 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum



- 5) Program Penataan Bangunan Gedung
  - 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - 7) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota
- b) Urusan Penataan Ruang
- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 yang terkait dengan fungsi tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan adanya sinergitas koordinasi yang tercermin dari rumusan visinya yaitu :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaultan energy, konektivitas bagi penguatan daya saing dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sector dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industry kontruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Dalam pengembangan kawasan strategis, pemerintah pusat dengan nawacita membagi wilayah Indonesia berdasarkan potensi per pulau atau dengan istilah WPS (Wilayah Pengembangan Strategis). Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Pengembangan WPS, kebijakan dan strateginya sebagai berikut :

1. Peningkatan mobilitas dan penurunan waktu tempuh serta integrasi antarmoda, baik antar pusat kegiatan;



2. Peningkatan ketersediaan air sepanjang waktu untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energy;
3. Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan di perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia.
4. Pengembangan infrastruktur pengembangan wilayah, khususnya untuk peningkatan ketahanan dan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (MAPI) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
5. Pengembangan infrasturktur, khususnya untuk pengembangan kawasan strategis, termasuk di dalamnya situs warisan Indonesia, kawasan Pariwisata, serta kawasan strategis ekonomi, mempertahankan fungsi lindung kawasan konservasi serta untuk pembangunan kawasan pertumbuhan baru kota Bandar Kayangan.

Dari pembagian 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) di seluruh Indonesia, Nusa Tenggara Barat masuk dalam 2 WPS yaitu WPS 16 (Tanjung-Mataram-Mandalika) dan WPS 17 (Sumbawa Besar-DOmpu-Bima). Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TAhun 2015-2019 dan 2020-2024 mempunyai tujuan :

- Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energy, industry dan sekr eoknomi unggulan;
- Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan system logistic nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
- Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Pemenuhan kabutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis;





- Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
- Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberkalanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi;
- Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya;
- Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi;
- Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

**Table 3.3. Telaahan Renstra K/L dan RENstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

	<b>Renstra K/L dan Renstra PD Prov./ Kab./Kota</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendukung</b>
	Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada DI yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan DI. Lintas Daerah Kab./ Kota; dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa Tambak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya jumlah irigasi primer dan sekunder pada DI yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten</li> <li>2. Terdapat defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI di musim kemarau;</li> <li>3. serta bangunan irigasi yang sudah berumur;</li> <li>4. Masih adanya daerah pertanian yang rawan kekeringan yang diakibatkan karena kurangnya/ belum optimalnya pasokan sumber air bak</li> <li>5. Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terintegrasinya DI yang menjadi kewenangan provinsi dengan Kabupaten</li> <li>2. Terbatasnya sumber daya manusia,</li> <li>3. lemahnya pengendalian , pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pelestarian fungsi dan layanan sumber daya air.</li> <li>4. Belum terdeteksinya mata air baru karena keterbatasan alat dan dana</li> <li>5. Belum terpetanya semua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang terga-bung ke dalam P3A;</li> <li>2. Mendukung pemantapan ketahanan sumber daya air dan kedaulatan pangan, guna menggerakkan sektor-sektor stra-tegis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.</li> <li>3. Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola air baku yang di ambil dari</li> </ol>



		dan Pusat	daerah yang perlu penambahan air baku sesuai dengan prioritas	mata air setempat
	penyelenggaraan Jalan Provinsi; dan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Belum seluruhnya jalan dan jembatan Kabupaten yang dipelihara dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan Kabupaten	Keterbatasan fiskal daerah	Tersedianya dukungan pemerintah untuk mengatasi penanganan jalan untuk daerah wisata di P. Lombok dan KSN
		um tersaji secara lengkap informasi data base jalan dan jembatan	Kerbatasan SDM yang dimiliki	Tersedianya informasi jalan dan jembatan
	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	gginya target yang ingin dicapai Renstra K/L (Pelayanan air minum dan air limbah 100% ) belum dapat terpenuhi	Keterbatasan fiskal, adanya kesulitan mencari lokasi sumber air baru	Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	um Seluruh bangunan gedung negara dikelola dengan benar mengikuti peraturan perundangan yang berlaku bagi bangunan gedung	Belum seluruh pembangunan bangunan gedung diselenggarakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan	Adanya keinginan pengelola bangunan gedung, untuk menyelenggarakan secara tertib administrasi dan teknis
	Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di kabupaten.</li> <li>- Belum optimal peran jakon terhadap pembinaan jasa konstruksi;</li> <li>- Tidak seimbang antara supply dan demand jasa konstruksi di pasar sehingga banyak jasa konstruksi yang belum tersertifikat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya penguasaan teknologi untuk pelaku jasa konstruksi;</li> <li>- Masih minimnya akses permodalan badan usaha</li> </ul>	- Adanya potensi kegiatan konstruksi



			<p>jasa konstruksi dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih sering terjadi kegagalan bangunan</li> <li>- mutu konstruksi yang belum sesuai standard</li> </ul>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya jumlah dokumen produk tata ruang Kabupaten Lombok Tengah berupa :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RTRW</li> <li>2. Dokumen RDTR;</li> </ol> </li> <li>- Kurangnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Kabupaten</li> </ul>	Masih belum terkenda-linya pemanfaatan ruang dan pemahaman terhadap pedoman penyelenggaraan penataanruang masih rendah.	Telah adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nomor 3 Tahun 2010; dan Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam program pemanfaatan ruang</li> <li>- Masih kurangnya rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan</li> <li>- Masih kurangnya database dan sistem informasi penataan ruang</li> </ul>	Produk Tata Ruang dan penyebarluasan informasi bidang penataan ruang belum seluruhnya menyentuh sampai ke tingkat Kecamatan & pedesaan	Tersedianya NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) bidang Penataan Ruang sebagai acuan program Pemanfaatan Ruang.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang dikarenakan kurangnya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.	Belum semua wilayah, terdeteksi adanya zonasi yang berbahaya, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang masih terkendala	Sudah dimasukkannya aturan tentang zonasi yang sudah terdeteksi, pada perda kabupaten kota.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah 2020



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031.

Ruang lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan kebijakan dan strategi yang disusun untuk pencapaian tujuan penataan ruang kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan dengan memberi ruang terdepan terhadap tujuan keberadaan Perda RTRW sebagai bentuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha, beberapa muatan materi yang memiliki korelasi dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah diantaranya:

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi SKPD	Bidang pada Perangkat Daerah terkait	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<b>Struktur Ruang</b>				
Sistem Transportasi Darat berupa jaringan jalan dan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Pasal 12 12)	Bidang Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi jaringan jalan kabupaten belum mencapai 100 % mantap</li> <li>Belum adanya koordinasi terkait pengembangan kawasan perkotaan ke kawasan baru yang membutuhkan penambahan ruas jalan baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan anggaran</li> <li>Road Map dan rencana aksi penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan belum tersusun secara rinci, sehingga belum operasional</li> <li>Konflik kepentingan yang memiliki unsur muatan politis akan mempengaruhi</li> </ul>	Arahan RTRW untuk memprioritaskan penanganan jalan yang mendukung transportasi dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat kegiatan (PPL, PPK, PPLp) Pada RPJMD, infrastruktur jalan terutama di daerah-



Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi SKPD	Bidang pada Perangkat Daerah terkait	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran memiliki keterbatasan untuk memenuhi kondisi jalan 100 % mantap</li> <li>• Potensi terjadinya konflik</li> </ul>	kebijakan anggaran.	daerah perdesaan harus tetap terpelihara dan terus ditingkatkan (RPJMD Tahun 2016-2021)
Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Pasal 18)	Bidang Sumber Daya Air	Pengurangan areal irigasi tersebut terjadi akibat alih fungsi lahan seperti pada pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), pembangunan pemukiman, dan semisalnya	Data Daerah Irigasi masih bersifat data tabular, belum data spasial yang merujuk pada lokasi	Faktor eksternalitas berupa kebijakan penanganan Alih Fungsi Lahan Sawah melalui sejumlah Peraturan Pemerintah dan peraturan turunannya, termasuk di dalamnya adalah Daerah Irigasi
<b>Pola Ruang</b>				
Rencana Pola Ruang Wilayah (Bab V Pasal 20 – Pasal 33)	Bidang Penataan Ruang	Perubahan fungsi peruntukkan di Kawasan Kuta sebagai KEK Mandalika melalui PP Nomor 54 Tahun 2016 Belum tersebarnya informasi dan wawasan mengenai pengetahuan tentang pemanfaatan ruang sesuai	Keberadaan RDTR yang belum bermutasi statusnya sebagai Perda/Perkada	Percepatan RDTR untuk menjadi Perkada pasca UU Cipta Kerja dan PP turunannya, yang mewajibkan investasi yang terkait pemanfaatan ruang wajib melalui mekanisme OSS dengan status RDTR harus Perkada.
<b>Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten</b>				
Kawasan Strategis Kabupaten (Pasal 36)	Bidang Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan Kawasan Strategis Kabupaten dengan penyusunan RTR nya sebagai implikasi UU CK Nomor 11 Tahun 2020</li> <li>• Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan dan disusun sebagai bentuk kebijakan daerah dalam memproyeksikan perkembangan optimis terhadap kawasan strategis tersebut. Efek dengan dihapuskannya Kawasan Strategis Kabupaten mengharuskan daerah untuk mengakomodirnya dalam kriteria kawasan perkotaan atau yang memiliki ciri perkotaan atau</li> </ul>	-	Keberadaan mekanisme perizinan berusaha melalui OSS yang bersifat digital dan elektronik, yang berbeda dengan sistem OSS edisi sebelumnya dan versi manual, sehingga memiliki peluang untuk mempercepat penetapan Perkada RDTR pada lokasi yang sebelumnya ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten.



Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi SKPD	Bidang pada Perangkat Daerah terkait	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		yang direncanakan sebagai kawasan perkotaan. • Salah satu kriteria untuk merevisi Perda RTRW		
Arahan Pemanfaatan Ruang (Pasal 37 dan Pasal 38)	Bidang Penataan Ruang	Rincian Indikasi Program Utama tidak selalu menjadi pedoman bagi sektor/instansi dalam menyusun kebijakan dan kegiatan turunannya. Sehingga upaya dalam perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang akan terhambat		
Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pasal 39 sampai Pasal 66)	Bidang Penataan Ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang		
Ketentuan Perizinan (Pasal 67 sampai Pasal 74)	Bidang Penataan Ruang			
Ketentuan Insentif dan Disinsentif (Pasal 75 sampai Pasal )	Bidang Penataan Ruang	Belum diterapkan dengan optimal secara praktik penyelenggaraan		
Arahan sanksi (Pasal 78 sampai Pasal 80)	Bidang Penataan Ruang	Mekanisme dan SOP penerapan sanksi belum tersusun dan ditetapkan		

### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.



KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan dinas pada Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan





kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPR di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:





a) Sekretariat

Permasalahan pada sekretariat Dinas yakni pada penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal, masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat, kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah belum optimal, belum optimalnya data dan informasi Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta peran aktif Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah sebagai perpanjangan tangan Bupati selaku Kepala Daerah masih perlu ditingkatkan

b) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan utama urusan penataan ruang adalah perencanaan ruang yang belum dapat mewujudkan fungsi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sedangkan di bidang infrastruktur permasalahan utama adalah penyediaan infrastruktur yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kurangnya acuan penerapan dan implementasi RTRW serta kurangnya sumber daya aparatur dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tata ruang masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas masih merupakan kendala dalam mewujudkan fungsi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Belum seluruhnya jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap sesuai dengan kapasitasnya, minimnya sarana pendukung prasarana jalan terutama penerangan jalan dan fasilitas keselamatan jalan

Cakupan layanan irigasi yang belum berfungsi secara optimal yang disebabkan oleh minimnya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi serta belum terintegrasinya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi secara representatif yang mengakibatkan defisit imbalanced air irigasi pada beberapa DI/water District di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur, serta kurang optimalnya koordinasi antar GP3A dan daya dukung masyarakat petani dalam pengelolaan air irigasi.



Cakupan layanan air bersih masih minim karena minimnya titik mata air dan debit air sehingga belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air bersih yang layak, belum optimalnya peran kabupaten dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air minum.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum;
- Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah;
- Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;
- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan;
- Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya belum optimal;
- Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten;
- Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang;
- Masih belum optimalnya pemanfaatan surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis.
- Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis (belum mantap);
- Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu marka pengaman jalan dan terminal;
- Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi;

#### 1. Asumsi Dan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK)

Asumsi atau assumptions merupakan kesimpulan/conclusions (bukan “anggapan”) tentang faktor – faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi. Dalam kaitannya dengan penyusunan perencanaan stratejik organisasi, asumsi dapat disebut sebagai “asumsi



organisasi". Asumsi ini harus mencantumkan semua kondisi atau keadaan selengkap – lengkapnya dan tidak dibenarkan untuk menghilangkan atau menghapuskan sebagian kecil apapun data tentang kondisi yang berkaitan dengan visi dan misi serta nilai – nilai organisasi. Hal ini penting, karena hal yang kecil pada masa kini dapat saja menjadi hal yang besar pada masa depan. Hal ini juga mencegah agar organisasi tidak menyusun suatu perencanaan stratejik dengan dasar atau anggapan bahwa dimasa depan tidak akan terjadi suatu situasi atau keadaan yang maha sulit. Perencanaan ini memerlukan dasar yang konsisten. Dengan mengembangkan asumsi – asumsi yang penting, manajemen dapat memperoleh dasar – dasar perencanaan stratejik, dan untuk selanjutnya menyusun rencana kerja atau "action plan", implementasi perencanaan stratejik yang mantap.

Setelah melakukan pencermatan (scanning) kekuatan dan kelemahan serta pencermatan peluang dan tantangan lingkungan stratejik, yang pada hakekatnya merupakan pendataan dan pengidentifikasian sebagai pra analisis, selanjutnya data tersebut disusun dalam suatu diagram matriks SWOT. Dengan matriks SWOT dapat diperoleh faktor – faktor dominan yang merupakan prioritas, menjadi asumsi (ASI). berpengaruh dalam pencapaian tujuan sehingga berfungsi untuk lebih memfokuskan strateji organisasi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan secara efektif dan efisien. Liputan FPK cukup luas, serta sangat erat kaitannya dengan pencapaian visi dan misi, dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan misinya. Pada umumnya jumlah FPK tidak lebih dari sepuluh dan bahkan banyak perencanaan yang mempunyai empat sampai tujuh FPK.

Faktor-faktor penentu keberhasilan ini sangat membantu para pimpinan organisasi dalam mengembangkan suatu perencanaan stratejik agar lebih mudah dikomunikasikan dan dilaksanakan.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disajikan faktor-faktor penentu keberhasilan dan strateji sebagaimana berikut ini :





## Analisis Stratejik dan Pilihan (Strategic Analysis dan Choises)

<p>Internal (ALI)</p> <p>Eksternal (ALE)</p>	<p><b>Strenght (Kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Terbentuknya Dinas PU dilengkapi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), sesuai PP No 41 tahun 2008 dan Perbup No 29 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</i></li> <li>2 <i>Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai</i></li> <li>3 <i>Fasilitas kerja memadai</i></li> <li>4 <i>Motivasi Aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya cukup tinggi</i></li> </ol>	<p><b>Weakness (kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal</i></li> <li>2 <i>Kompetensi beberapa pejabat tidak sesuai dengan jabatannya</i></li> <li>3 <i>Belum Proporsionalnya jumlah tenaga teknis dan Non teknis</i></li> <li>4 <i>Sarana penunjang terutama yang terkait dengan alat-alat berat belum memadai</i></li> </ol>
<p><b>Opportunity (Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Komitmen Pemda dalam pengalokasian anggaran cukup tinggi</i></li> <li>2 <i>Tersedianya sumber-sumber pembiayaan alternatif</i></li> <li>3 <i>Peraturan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ke-PU-an sudah tersedia</i></li> <li>4 <i>Adanya perguruan tinggi, LSM dan kelembagaan masyarakat yang siap bekerja sama</i></li> </ol>	<p><b>Strateji SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk merencanakan pembangunan didesa. (bottom Up)</li> <li>2 Menjalin kerja sama dg PTN, PTS serta LSM dalam survey, pengelolaan (kemitraan) aset<sup>2</sup> kimpraswil.</li> <li>3 Meningkatkan peran TOGA dan TOMA dalam memberdayakan masyarakat</li> <li>4 Meningkatkan kesadaran dalam tertib pemanfaatan prasarana kepada masyarakat.</li> </ol>	<p><b>Strateji WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memberikan kesempatan diklat kepada aparatur kimpraswil dan penyuluhan kepada masyarakat.</li> <li>2 Pemberian stimulan kepada masyarakat untuk dikembangkan menjadi lebih besar dalam pengelolaan.</li> <li>3 Kerjasama dengan para pakar utk menetapkan PROTAP.</li> <li>4 Penyerahan program yang bersifat perawatan (pemeliharaan rutin) kepada masyarakat/swasta (pola KSO).</li> </ol>
<p><b>Threats (Tantangan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah masih rendah</i></li> <li>2 <i>Kondisi Infrastruktur belum memadai</i></li> <li>3 <i>Kapasitas kelembagaan terutama di tingkat masyarakat belum memadai</i></li> <li>4 <i>Kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Bidang ke-PU-an masih rendah</i></li> </ol>	<p><b>Strateji ST.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk mampu membiayai pemeliharaan prasarana desa.</li> <li>2 Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan prasarana melalui pola KSO (kerjasama operasional).</li> </ol>	<p><b>Strateji WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membatasi pembangunan prasarana secara efektif dan efisien dengan lebih mengutamakan perawatan pada prasarana yang sudah ada.</li> </ol>

Dari hal tersebut diatas maka dapat ditetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut :

- 1). Mengutamakan pembangunan dan pengelolaan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang aspiratif (bottom up).
- 2). Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara kontinyu dan berkesinambungan.
- 3). Menjalin kerjasama dengan para pakar dari PTN, PTS, TOGA, TOMA serta LSM dalam perencanaan dan pengelolaan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4). Memberdayakan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



- 5). Mengutamakan perawatan (pemeliharaan) prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sudah ada, membatasi secara selektif, efektif dan efisien pembangunan prasarana yang relatif membutuhkan dana besar.

### Penentuan Peringkat Faktor

No	Faktor	Bobot	Rating	Score (Bbt x Rtg)	Prioritas
<b>I</b>	<b><u>Kekuatan (Strenght)</u></b>				
1.	<i>Terbentuknya Dinas PU dilengkapi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), sesuai PP No 41 tahun 2008 dan Perbup No 29 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</i>	35	4	140	I
2.	<i>Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai</i>	25	3	75	II
3.	<i>Fasilitas kerja memadai</i>	20	2	40	IV
4.	<i>Motivasi Aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya cukup tinggi</i>	20	3	60	III
	<i>Jumlah</i>	100			

<b>II</b>	<b><u>Kelemahan (Weakness)</u></b>				
1.	<i>Kompetensi beberapa pejabat tidak sesuai dengan jabatannya</i>	25	3	75	II
2.	<i>Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal</i>	30	4	120	I
3.	<i>Belum Proporsionalnya jumlah tenaga teknis dan Non teknis</i>	25	2	50	III
4.	<i>Sarana penunjang terutama yang terkait dengan alat-alat berat belum memadai</i>	20	2	40	IV
	<i>Jumlah</i>	100			

No	Faktor	Bobot	Rating	Score (Bbt x Rtg)	Prioritas
<b>I</b>	<b><u>Peluang (Opportunity)</u></b>				
1.	<i>Komitmen Pemda dalam pengalokasian anggaran cukup tinggi</i>	35	4	140	I



2.	<i>Tersedianya sumber-sumber pembiayaan alternatif</i>	25	3	75	II
3.	<i>Adanya perguruan tinggi, LSM dan kelembagaan masyarakat yang siap bekerja sama</i>	15	2	30	IV
4.	<i>Peraturan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ke-PU-an sudah tersedia</i>	25	2	50	III
<i>Jumlah</i>		100			

II	<u>Tantangan (Threats)</u>				
1.	<i>Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah masih rendah</i>	35	4	140	I
2.	<i>Kondisi Infrastruktur belum memadai</i>	25	3	75	II
3.	<i>Kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Bidang ke-PU-an masih rendah</i>	20	2	40	IV
4.	<i>Kapasitas kelembagaan terutama di tingkat masyarakat belum memadai</i>	20	3	60	III
<i>Jumlah</i>		100			

Catatan :

Mohon Penyempurnaan Nilai rating dari 1 s/d 5

Berdasarkan hasil penentuan peringkat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangandiperolehfaktor dominan sebanyak 9 (sembilan) asumsi - asumsi yaitu sebagai berikut:

- a. Terbentuknya Dinas PU dilengkapi UPTD (*Unit Pelaksana Teknis Dinas*) sesuai PP No.41 Tahun 2008 dan Perbup No. 29 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akan memberikan kejelasan terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab masing – masing aparatur.



- b. Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai Cipta Karya dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam pengelolaan prasarana sehingga memberikan dasar hukum serta batasan yang pasti bagi para pelaksana.
- c. Adanya Otonomi Daerah dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 akan memberikan kewenangan Kepala Daerah yang lebih luas untuk mengatur urusan rumah tangganya.
- d. Adanya PTN dan PTS serta LSM yang ingin bekerja sama, keberadaan Tokoh Agama/Tuan Guru, Tokoh Masyarakat di daerah yang sangat agamis dan paternalistik, akan sangat menentukan bagi pemerintah sebagai mitra didalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
- e. Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan prasarana yang seringkali berujung tidak tertanganinya semua rencana yang sudah terprogram (rata-rata setiap tahun 30 % yang tertangani), di sebabkan terbatasnya alokasi dana Pemerintah yaitu DAU atau APBD murni (PAD) untuk pengelolaan prasarana dasar, sehingga harus berdasarkan skala prioritas yang sangat ketat dan menetapkan prosedur tetap (PROTAP) yang tertuang dengan jelas sebagai pedoman pelaksanaan anggaran.
- f. Adanya kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal, sedangkan secara kuantitas cukup memadai, disamping itu adanya beberapa personal mastery yang dapat memberikan dorongan dan motivasi, maka pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas untuk ditingkatkan.
- g. Begitu tingginya aspirasi masyarakat/ stakeholders dalam permintaan pelayanan prasarana yang mantap, karena merupakan kebutuhan dasar dan menjadi pengungkit yang strategik untuk pertumbuhan perekonomian rakyat.
- h. Perlunya sosialisasi tentang program dan pemanfaatan prasarana, akan memotivasi masyarakat/stakeholders untuk melaksanakan pengelolaan secara swadaya dan meningkatkan disiplin masyarakat.
- i. Krisis multi dimensi yang berkepanjangan, yang mengakibatkan banyak masyarakat menjadi miskin, memungkinkan sistem pengelolaan prasarana secara padat karya untuk membantu masyarakat





## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHL
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
T1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Infrastruktur Wilayah			Index Infrastruktur = (20 x S1) + (20 x S2) + (20 x S3) + (20 x S4)+ (20 x S5)			56%	58%	61%	66%	70%	74%	74%
S1			Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan kondisi mantap}}{\text{Jumlah Panjang Jalan total}} \times 100\%$	Database jalan bidang Bina Marga	DPUPR	66,47	73,17	79,88	86,58	93,29	99,99	100
				Persentase jumlah jembatan kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan total}} \times 100\%$			20,89	21,58	21,92	24,81	25,57	25,95	25,95
S2			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	$\frac{\text{jumlah gedung pelayanan public dalam kondisi baik}}{\text{Total gedung pelayanan public}} \times 100\%$		DPUPR	60	62	64	66	68	70	70
S3			Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	Mengisi formulir survey index kinerja irigasi		DPUPR	51,4	54	56,9	58,3	60,5	62,8	62,8
S4			Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	$\frac{\text{£ Penduduk yang terlayani}}{\text{£ seluruhkab / kota Penduduk}} \times 100\%$	Data Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Loteng	DPUPR	78,83	80,37	81,92	83,46	85,01	86,56	86,56
S5			Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	$\frac{\text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah IPLT}}{\text{Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha}} \times 100\%$	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	DPUPR			0,55	2,24	3,93	5,62	7,31
				Cakupan Pelayanan SPALDT	$\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbhnya diolah di IPALD}}{100\%} \times 100\%$	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)				0,55	2,24	3,93	5,62	7,31

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
		Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang			$Index = (40 \times S6) + (20 \times S7) + (40 \times S8)$		DPUPR	13	28	42	62	81	100	100
S6			Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	$\frac{Jumlah\ Materi\ Teknis\ RTR\ tersusun}{Jumlah\ Materi\ Teknis\ RTR\ keseluruhan} * 100$		DPUPR	11	22	33	55	78	100	100
				Jumlah Perda dan Perkada	$\frac{Jumlah\ Perkada\ RTR}{Jumlah\ Perkada\ RTR\ keseluruhan} * 100$			11	22	33	55	78	100	100
S7			Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	$\frac{Jumlah\ Penerbitan\ PKKPR\ sesuai\ Rencana\ Tata\ Ruang}{Jumlah\ Penerbitan\ PKKPR\ Keseluruhan} * 100$		DPUPR	16	33	50	67	83	100	100
S8			Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi KKPR yang dinilai	$\frac{Jumlah\ lokasi\ PKKPR\ yang\ dinilai}{Jumlah\ Lokasi\ Penilaian\ PKKPR\ keseluruhan} * 100$		DPUPR	16	33	50	67	83	100	100
				Jumlah pengaduan yang ditangani	$\frac{Jumlah\ Pengaduan\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Pengaduan\ yang\ masuk} * 100$			9	27	45	64	82	100	100

#### Definis Operasional:

- 1 Index Infrastruktur adalah suatu metode atau alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, ketersediaan, dan efisiensi infrastruktur dalam suatu wilayah, negara, atau proyek tertentu. Infrastruktur yang diukur melalui index infrastruktur di batasi pada infrastruktur yang menjadi kewenangan DPUPR
- 2 - Jumlah panjang jalan kondisi mantap adalah Jumlah panjang jalan dalam kondisi (baik dan sedang)
  - Jumlah panjang jalan total adalah Jumlah panjang jalan yang menjadi
- 3 - Jumlah jembatan kondisi baik adalah jumlah jembatan dalam kondisi (baik

#### Rentang Nilai Index Irigasi:

1. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi > 90%, pemeliharaan rutin.
2. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi 80-90%, pemeliharaan berkala.

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	

4 Indeks Kinerja Irigasi (Irrigation Performance Index) adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sistem irigasi. Indeks ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti penyediaan air yang cukup untuk pertanian, peningkatan produktivitas, penghematan air, dan pengurangan kerugian akibat kelebihan atau kekurangan air. Perhitungan index kinerja irigasi dilakukan dengan cara melakukan survei dengan mengisi formulir survei index kinerja irigasi

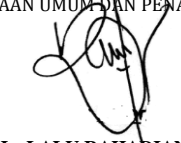
3. Kondisi Jaringan Irigasi 60-80% , pemeliharaan SM (Spesial Maintenance).

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHL				
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)					
5	Jumlah DI total adalah Jumlah DI kabupaten																	
6	Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan (sumur dangkal, sumur dalam/sumur bor, dan penampung air																	
7	jumlah penduduk kabupaten adalah seluruh jumlah penduduk yang tercatat pada data kependudukan																	
8	SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat/MCK individual yang berada di wilayah lombok tengah																	
9	SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpusat/MCK komunal yang berada di wilayah lombok tengah																	
10	IPLT adalah instalasi pengolahan lumpur tinja,																	
11	Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Indeks Pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah				PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum													
12	Perencanaan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah				PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum													
13	Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)				PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum													
14	Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) di Kabupaten Lombok Tengah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)				PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum													
15	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah				PP Nomor 21 Tahun 2021 Ketentuan Umum													
16	Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai RTR di Kabupaten Lombok Tengah				Permen ATR Nomor 11/2021													
17	Materi Teknis RTR adalah buku rencana dan fakta analisa RTR di Kabupaten Lombok Tengah																	
18	Perda/Perkada RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai produk legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok sesuai peraturan yang berlaku				Pasal 193 PP 21/2021													
19	Pengaduan adalah pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui pelaporan dari unit pengaduan dan daring																	

**Penilaian ambang batas index Infrastruktur:**

1. 0-25 = Kurang,
2. 26-50 = Sedang,
3. 51-75 = Baik,
4. 76-100 = Sangat Baik

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



**I. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien

Tabel 5.1.

### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : wujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)			
MISI 3 : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersedianya Pusat layanan Publik dan meningkatnya ketaataan ruang	Tersedianya gedung pelayanan publik dan Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pengembangan mall pelayanan publik



MISI 4 : Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas			
1. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Peningkatan kualitas dan kapasitas dan system jaringan infrastruktur jalan	1. Meningkatkan kualitas aksesibilitas jalan Kabupaten
			2. Peningkatan keselamatan jalan
2. Meningkatkan Cakupan Layanan Sistem Jaringan Irigasi Kabupaten	Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi	Peningkatan operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, pembinaan dan pengembangan SDM dan kelembagaan
3. Meningkatkan Akses Air Minum	Meningkatnya distribusi air minum	Peningkatan kapasitas layanan air minum	1. Meningkatkan system penyediaan air minum daerah
			2. Peningkatan dan perlindungan sumber air



Strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan mengarahkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, dan dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diimplementasikan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2021-2026. Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas OPD, lintas OPD, dan kewilayahan.

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah seperti telah diuraikan pada bab IV, maka program dan kegiatan Dinas adalah sebagai berikut :



## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025					2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		Indeks Konektivitas	NA	66,28		73,02		79,764		86,506		93,248		99,99		99,99	DPUPR		
	Sasaran : Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Presentase jalan dalam kondisi mantap	65,03	66,47		73,17		79,88		86,58		93,29		99,99		99,99			
	Program : Penyelenggaraan Jalan	Presentase Jalan mantap	65,03	66,47	111.770.183.980	73,17	210.901.091.990	79,88	145.523.291.990	86,58	145.867.491.990	93,29	133.157.891.990	99,99	116.083.291.990	99,99			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan mantap Kabupaten		538,39	55.885.091.990	592,66		647,01		701,28		755,63		809,90					
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Dokumen perencanaan jalan		3	198.000.000	4	400.000.000												
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Akhis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen				4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen Leger Jalan		0		1	300.000.000												
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen				1	300.000.000											
	Sub Kegiatan : Pelebaran Menuju Jalan Standar	Panjang jalan yang lebarnya sesuai standar/L 5,5M (32,08 Km)		0		8,4	33.600.000.000												
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM					15,3	61.200.000.000	14,85	59.400.000.000	10,85	43.400.000.000	6,7	26.800.000.000			6,7	
	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan mantap (195,46 Km)		11,725	26.200.000.000	37,66	101.682.000.000	37,66										0	
		panjang jalan (km)		135	26.787.091.990	135	26.787.091.990												
		Panjang jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	KM					135	26.787.091.990	135	26.787.091.990	135	26.787.091.990	135	26.787.091.990	135		135	
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang di rehabilitasi 23,27 Km		0,18	200.000.000	5	11.000.000.000												
		Panjang jalan yang Direhabilitasi	KM					5	12.100.000.000	5	12.100.000.000	5	12.100.000.000	5	12.100.000.000	5		5	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (54,69 Km)		0		9,11	20.042.000.000												
		Panjang jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM					10,11	24.466.200.000	11,12	26.910.400.000	11,24	27.200.800.000	13,11	31.726.200.000	13,11		13,11	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan mantap yang dipelihara (809,879 Km)		188,06	2.500.000.000	500	10.000.000.000												
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM					500	10.000.000.000	500	10.000.000.000	500	10.000.000.000	500	10.000.000.000	500		500	
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan kabupaten yang terbangun(meter)		0		0		10	2.000.000.000	10	2.000.000.000							0	
		Panjang jembatan yang Dibangun	M					0		0		0		0				0	
	Sub Kegiatan : Penggantian Jembatan	Jumlah Penggantian Jembatan Kabupaten (5 buah)		0		1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1		1	
		Panjang jembatan yang Dilakukan Penggantian	M					0		0		0		0				0	
	Sub Kegiatan : Pelebaran Jembatan	Jumlah Pelebaran Jembatan (5 buah)		0		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1		1	
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	M					10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10		10	
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang di rehabilitasi (30 buah)		0		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2		2	
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M					20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20		20	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang terPelihara(100 buah)		0		15	150.000.000											0	
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M					50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50		50	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang terpelihara berkala (30 buah)		0		1	180.000.000											0	
		Panjang jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M					20	360.000.000	20	360.000.000	20	360.000.000	20	360.000.000	20		20	
	Sub Kegiatan : Pengangulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah material tanggap darurat (jenis)		0		3	560.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2		2	
		Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	KM					0,25	360.000.000	0,25	360.000.000	0,25	360.000.000	0,25	360.000.000	0,25		1	

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Meningkatkan Cakupan Layanan Sistem Jaringan Irigasi Kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	56.1	58.6	61.1	63.6	66.1	68.6	71.1	71.1						
Sasaran : Meningkatnya prosentase Di kewenangan kabupaten yang terlayani	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	58 Daerah Irigasi / 13.393 Ha	13.393												
Program : Pengelolaan SDA	Prosentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	45,72%	65.11	9.394.742.599	69,19	10.803.953.988	81,81	13.504.942.486	84,92	13.792.821.199	86,95	18.206.763.990	89,56	22.547.690.819	89,56
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan debit air per hektar	1,7 ltr/dtk/ha	1,7 ltr/dtk/ha	5.406.000.000	1,7 ltr/dtk/ha	6.815.211.389	1,7 ltr/dtk/ha	17.741.462.486	1,7 ltr/dtk/ha	18.095.642.398	1,7 ltr/dtk/ha	24.393.527.980	1,7 ltr/dtk/ha	30.635.381.638	1,7 ltr/dtk/ha
Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi bendungan, embung dan bangunan penampungan air lainnya	4 Dokumen	5	220.000.000	5	220.000.000									
	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	Dokumen					6	230.000.000	6	230.000.000	6	230.000.000	6	230.000.000	6
Sub Kegiatan2: Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun dan penampungan air lainnya	8 Daerah Irigasi	8	3.296.000.000	10	4.635.211.389	12	6.455.731.243	14	6.585.821.199	16	8.906.763.990	18	12.027.690.819	18
	Jumlah embung rakyat yang dibangun		10	1.560.000.000	10	1.560.000.000	14	2.160.000.000	15	2.197.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (unit)	Unit					14	8.615.731.243	15	8.782.821.199	20	11.906.763.990	20	15.027.690.819	20
Sub Kegiatan 3 : Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang terpelihara	10 bh	8	230.000.000	10	265.000.000									
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	Unit					12	280.000.000	14	300.000.000	16	350.000.000	16	350.000.000	16
Sub kegiatan 4 : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / kota	Jumlah kelembagaan Pengelolaan SDA kewenangan kabupaten / kota		12 bh	100.000.000	17	135.000.000	20								
	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Orang					25	150.000.000	30	170.000.000	35	220.000.000	40	240.000.000	40
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah irigasi primer dan sekunder pada Di yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		58 Daerah Irigasi	3.988.742.599		3.988.742.599									
Sub kegiatan 1: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi permukaan yang direhab	3 Daerah Irigasi	6	3.988.742.599	6	3.988.742.599									
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	KM					5	4.229.211.243	5	4.310.000.000	5	5.500.000.000	7	6.700.000.000	7

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Tersedianya Pusat layanan Publik dan meningkatnya ketaataan ruang	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	0	100%	1.000.000.000	40%	60.000.000.000	100%	60.000.000.000	0	50.000.000.000	0	40.000.000.000	0	33.000.000.000	0
	Ketaatan terhadap RTRW														
Sasaran : Tersedianya gedung pelayanan publik	Gedung Pemerintah Terbangun Tepat waktu	0	0	1.000.000.000	1	60.000.000.000	3	60.000.000.000	3	50.000.000.000	3	40.000.000.000	0	33.000.000.000	10
	Persentase pemenuhan regulasi Tata Ruang		65.54		69.50		75.80		85.76		89.65		92.55		92.55
Program : Penataan Bangunan Gedung	Gedung Pemerintah Terbangun Gedung	2	0	1.100.000.000	1	28.650.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10
Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah rekortek gedung, ruang dan layak fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	149 Dokumen Rekortek	150	1.100.000.000	150	28.650.000.000	175	10.000.000.000	175	10.000.000.000	175	10.000.000.000	175	10.000.000.000	175
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	15 Dokumen	1	1.100.000.000	10	560.000.000									
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					10	175.647.860	6	175.647.860	6	175.647.860	6	175.647.860	28
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun		0	0	0	3	8.000.000.000	3	2.509.255.142	3	2.509.255.142	3	2.509.255.142	3	2.509.255.142
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Mali pelayanan publik		0	0	0	1	11.229.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kantor UPT Peralatan dan kantor PUPR		0	0	0	1	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat		0	0	0	0	-	3	5.100.000.000	3	5.100.000.000	3	5.100.000.000	3	5.100.000.000
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gudang arsip dan bahan kantor bupati		0	0	0	0	-	1	716.565.253	0	716.565.253	0	716.565.253	0	716.565.253
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kantin kantor bupati		0	0	0	0	-	1	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Mushola kantor bupati		0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung serbaguna kantor bupati		0	0	0	0	-	1	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung pendopo 1 dan 2		0	0	0	1	7.000.000.000	1	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan		0	0	0	3	357.870.000	7	198.496.958	3	198.496.958	3	198.496.958	3	198.496.958
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen						17	9.824.317.353	9	9.824.317.353	9	9.824.317.353	9	9.824.317.353
sub kegiatan: Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah sesuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung yang direhabilitasi/renovasi		0	0	0	3	900.000.000								
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)	Unit						1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	luas bangunan dan lingkungan yang tertata		0	0	0	15.000	1.500.000.000	15.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	3
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	luas penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan		0	0	0	15.000	750.000.000	15.000	750.000.000	0	0	0	0	0	0	3
	Sub kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan	luas landscape yang ditata (m2)		0	0	0	15.000	750.000.000	15.000	750.000.000	0	0	0	0	0	0	3
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan								1	1.000.000.000	0		1	1.000.000.000	1
	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan		1	2	2.275.000.000	2	2.600.000.000	2	2.460.000.000	2	1.750.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2
	Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah perda dan perbup tata ruang		0	2	500.000.000	2	1.000.000.000	2	900.000.000	2	800.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	12
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten		0	0		1	500.000.000									1
		Jumlah Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang		0	2	400.000.000	2	400.000.000									
		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen						2	800.000.000	2	700.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang		0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	5	100.000.000	5
		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen						3	150.000.000	2	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen produk tata ruang		6	3	1.000.000.000	3	900.000.000	1	1.000.000.000	1	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	10
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten		1	1	300.000.000	1	200.000.000						0			2
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen						1	600.000.000							1
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR		5	2	600.000.000	2	600.000.000									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen						2	400.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi			10	100.000.000	10	100.000.000									
		Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen						1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang		450	400	575.000.000	500	400.000.000	550	300.000.000	600	350.000.000	700	400.000.000	750	400.000.000	3.500
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan		450	400	300.000.000	500	300.000.000									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen						600	300.000.000	700	350.000.000	800	400.000.000	800	400.000.000	800
	Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Database dan Sistem Informasi Penataan Ruang		1	1	275.000.000	1	100.000.000									
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen						10	100.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	20

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		3	5	200.000.000	5	300.000.000	5	260.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		3	5	200.000.000	5	200.000.000										
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen						5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	
	Sub Kegiatan: Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah PPNS Penataan Ruang		1	0		2	100.000.000	1	60.000.000							3	
		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus						1	60.000.000							1	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi					1	150.000.000										
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen						1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	
	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat		0	0,35%	90.000.000	0,35%	100.000.000	0,35%	100.000.000	0,35%	100.000.000	0,35%	100.000.000	0,35%	100.000.000	0,35%	
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat			0,35%	90.000.000	0,35%	100.000.000	0,35%	90.000.000	0,35%	90.000.000	0,35%	90.000.000	0,35%	90.000.000	0,35%	
	Sub Kegiatan: Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat			50	90.000.000	50	90.000.000										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen						1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	
	Sub Kegiatan: Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Data Tenaga Kerja Konstruksi			0		1	10.000.000										
		Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	
<b>Meningkatnya Akses Air Minum</b>		Cakupan Layanan Air Minum		77,28	77,78		78,28		78,78		79,28		79,78		80,28		80,28	
	Sasaran: Meningkatnya distribusi air minum	Menurunkan persentase kawasan rawan air minum																
	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman		77,28	78,83	27.958.712.000	80,37	31.195.500.000	81,92	33.178.000.000	83,46	34.190.500.000	85,01	34.961.000.000	86,56	35.891.000.000	86,56	
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat (SR) Terlayani dan Mengonsumsi Air bersih		13 Lokasi (855 SR)	1790	6.265.000.000	1967	6.884.500.000	2012	7.042.000.000	1987	6.954.500.000	1950	6.825.000.000	1930	6.755.000.000	1930	
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (dokumen)	Dokumen		6	300.000.000	8	400.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	8	400.000.000	7	350.000.000	49	
	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi sasi SPAM (dokumen)	Dokumen		6	300.000.000	8	400.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	8	400.000.000	7	350.000.000	49	
	Sub Kegiatan: Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Jaringan Pipa Distribusi dan sambungan rumah terlayani (kemiskinan)			50	175.000.000	250	875.000.000										
		Jumlah Pembangunan Sumur Bor Terlindungi akan terpenuhi sehingga cakupan akses air minum aman bisa tercapai (kematian ibu dan stunting)			391	1.368.500.000	450	1.575.000.000										
		Jumlah Jaringan Pipa Distribusi dan sambungan rumah terlayani (kematian ibu dan stunting)			332	1.162.000.000	400	1.400.000.000										
		Jumlah SR, Sumur Bor dan Jaringan pipa distribusi (SR)		8600	10300	12.811.000.000	10300	12.811.000.000										
		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR					10300	17.186.000.000	10300	17.186.000.000	10300	17.186.000.000	10300	17.186.000.000	10300	17.186.000.000	41.200

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Sub Kegiatan : Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah utilitas SPAM yang diperbaiki			4	573.212.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1		
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Cakupan Akses Air Minum Aman dan Sanitasi Layak terpenuhi			326	652.000.000	400	800.000.000											
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat						10	900.000.000	10	1.000.000.000	10	1.100.000.000	10	1.200.000.000	10		
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Cakupan Akses Air Minum Layak dan terlayannya Sambungan Rumah (SR)	SR		2176	4.352.000.000	3000	6.000.000.000	3500	7.000.000.000	4000	8.000.000.000	4500	9.000.000.000	5000	10.000.000.000	5000		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi layak dan aman		79.43	0	0	0	0	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik			0	0	0	0	2	10.950.000.000	2	11.400.000.000	2	10.950.000.000	2	11.400.000.000	2		
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DED SPALD yang disusun			0	0	0	0	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3		
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen						3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3		12
Sub. Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah SPALD skala kota yang terbangun			0	0	0	0											0
	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga						150	3.500.000.000	150	3.500.000.000	150	3.500.000.000	150	3.500.000.000	150		450
Sub. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPALD yang Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan			0	0	0	0	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3		
	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga						150	800.000.000	150	800.000.000	150	800.000.000	150	800.000.000	150		600
Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah ketersediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit								1	450.000.000	0	0	1	450.000.000	2		
Sub. Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Prasaran IPLT yang terbangun			0	0	0	0											
	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Rumah Tangga						150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150		600
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPALD skala Permukiman yang terbangun			0	0	0	0	3	4.050.000.000	3	4.050.000.000	3	4.050.000.000	3	4.050.000.000	3		12
	Kapasitas IPLT Terbangun	M <sup>3</sup> /Hari																

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Persentase akuntabilitas penyelenggaraan urusan		100	100		100		100		100		100		100		100
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SKPD		CC	CC	20.635.506.721	B	20.635.506.721	B	921.744.421	BB	921.744.421	BB	921.744.421	BB	921.744.421	BB
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	85.752.900	100	85.752.900	100	-	100	-	100	-	100	-	100
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran SKPD		7	7	48.474.400	7	48.474.400									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					7	48.474.400	7	48.474.400	7	48.474.400	7	48.474.400	7	48.474.400
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan		4	4	37.278.500	4	37.278.500									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen					4	37.278.500	4	37.278.500	4	37.278.500	4	37.278.500	4	37.278.500
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD		100	100	18.586.221.641	100	18.586.221.641	100	659.030.050	100	659.030.050	100	659.030.050	100	659.030.050	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		100	100	17.910.451.591	100	17.910.451.591									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					230	17.910.451.591	230	17.910.451.591	230	17.910.451.591	230	17.910.451.591	230	17.910.451.591
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Catatan Laporan Keuangan SKPD		2	2	659.030.050	2	659.030.050	2	659.030.050	2	659.030.050	2	659.030.050	2	659.030.050	2
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen					2	659.030.050	2	659.030.050	2	659.030.050	2	659.030.050	2	659.030.050
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD		12	12	16.740.000	12	16.740.000									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen					12	16.740.000	12	16.740.000	12	16.740.000	12	16.740.000	12	16.740.000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Layanan administrasi SKPD		100	100	382.968.131	100	382.968.131	100	218.416.131	100	218.416.131	100	218.416.131	100	218.416.131	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	100	218.416.131	100	218.416.131	100	218.416.131	100	218.416.131	100	218.416.131	100	218.416.131	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Paket					4	218.416.131	4	218.416.131	4	218.416.131	4	218.416.131	4	218.416.131
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi		12	12	164.552.000	12	164.552.000	12								0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket					4	164.552.000	4	164.552.000	4	164.552.000	4	164.552.000	4	164.552.000
	Kegiatan : Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD		100	100	44.298.240	100	44.298.240	100	44.298.240	100	44.298.240	100	44.298.240	100	44.298.240	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya Jasa Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik Kantor		100	100	44.298.240	100	44.298.240	100	44.298.240	100	44.298.240	100	44.298.240	100	44.298.240	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Laporan					12	44.298.240	12	44.298.240	12	44.298.240	12	44.298.240	12	44.298.240

**Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**



	Kegiatan : Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perentase Terpeliharannya Kendaran Dinas Operasional dan Alat Berat		100	100	1.536.265.809	100	1.536.265.809	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dalam Kondisi Baik		60	60	294.998.050	60	294.998.050	60									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Unit						60	294.998.050	60	294.998.050	60	294.998.050	60	294.998.050	60	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Unit Kendaran Alat Berat yang terpelihara		19	19	1.241.267.759	19	1.241.267.759										
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (unit)	Unit						19	1.241.267.759	19	1.241.267.759	19	1.241.267.759	19	1.241.267.759	19	



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Infrastruktur Wilayah	NA	65.05	66.55	68.05	69.55	71.05	72.55
2	Indeks Konektifitas	NA	66.28	73.022	79.764	86.506	93.248	99.99
3	Indek Kinerja Sistem Irigasi	56.1	56.1	61.6	63.6	66.1	68.6	71.1
4	Cakupan Layanan Air Minum	77.28	77.78	78.28	78.78	79.28	79.78	80.28



## VIII PENUTUP

Dokumen renstra yang terusun ini merupakan pedoman yang akan dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan (2021- 2026). Kepala Dinas PUPR merupakan penanggung jawab utama dan harus didukung oleh seluruh komponen pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan permukiman dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dokumen ini sifatnya merupakan dokumen strategis dan global yang masih perlu dijabarkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang lebih spesifik. Renstra ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan yang kemudian diurai ke dalam dokumen rencana kerja anggaran (RKA) sebagai dasar pengusulan anggaran.

Keberhasilan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dari semua pihak yang terkait terutama pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang di samping juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa lingkungan dan regulasi yang berlaku. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 ini berlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang sebelumnya disahkan oleh Bupati Lombok Tengah. Renstra ini berlaku tahun 2021 sampai dengan 2026 akan tetap digunakan/berlaku sampai ditetapkannya renstra yang baru.

